



LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKPA PANGKALAN PSDKP LAMPULO TAHUN 2025 *AUDITED*

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2025



**PANGKALAN PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN LAMPULO**

Laporan Keuangan dan
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Tahun 2025 Audited

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antaralain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan lampulo adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan Tingkat UAKPA periode Tahun 2025 *Audited* berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Banda Aceh, 4 Mei 2026

Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Abdul Quddus, S.St.Pi., M.Pi.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca.....	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	26
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	92
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	121
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	136
F. Pengungkapan Penting Lainnya	141
Lampiran dan Daftar.....	149

**PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO**

*Jalan Indra Budiman No. 12 Lampulo Banda Aceh
Telepon 0651 6303980, Faximile 0651 6303980*

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan UAKPA Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo periode Tahun 2025 *Audited* terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banda Aceh, 4 Mei 2026
Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Abdul Quddus, S.St.Pi., M.Pi.

Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo Tahun 2025 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan, LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp10.800.000,00**.

Realisasi Belanja Negara Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp30.098.768.255,00** atau mencapai 91,09 persen dari alokasi anggaran sebesar **Rp33.043.832.000,00**.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar **Rp25.476.839.368,00**, yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp474.547.590,00**. Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar **Rp0**; Aset Tetap (neto) sebesar **Rp23.569.363.135,00** dan Aset Lainnya (neto) sebesar **Rp10.000.000,00**.

Nilai Kewajiban sebesar **Rp26.166.864,00** dan Ekuitas sebesar **Rp24.027.743.861,00**.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional,

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp32.976.177.004,00, sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp32.976.177.004,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Sebelum POS Luar Biasa masing-masing sebesar Rp96.576.000,00 dan sebesar defisit Rp32.976.177.004,00, sehingga entitas mengalami defisit LO sebesar Rp32.976.177.004,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp25.969.887.937,00. dikurangi Defisit-LO sebesar Rp32.976.177.004,00 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai defisit Rp987,466,362,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar surplus Rp31.924.923.290,00 sehingga ekuitas mengalami penurunan sebesar Rp1.942.144.076,00 dan Ekuitas akhir Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 adalah senilai Rp24.027.743.861,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 AUDITED DAN 2024 AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025 Audited		% thd Angg	31 Desember 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1		10.800.000	-	64.823.246
JUMLAH PENDAPATAN		-	10.800.000	-	64.823.246
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	9.964.379.000	9.963.618.662		9.008.334.550
Belanja Barang	B.4	20.641.986.000	17.697.694.111		17.015.252.166
Belanja Modal	B.5	2.437.467.000	2.437.455.482		4.997.699.402
Belanja Bantuan Sosial	B.6				
JUMLAH BELANJA		33.043.832.000	30.098.768.255	91.09	31.021.286.118

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 AUDITED DAN
2024 AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025 Audited	31 Desember 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	
Piutang Bukan Pajak	C.4		
Bagian Lancar TP/TGR	C.5		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7		
Belanja Dibayar di Muka	C.8	2.500.000	6.666.667
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9		
Persediaan	C.10	472.047.590	213.895.710
Jumlah Aset Lancar		474.547.590	220.562.377
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11		
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13		
Jumlah Piutang Jangka Panjang			
ASET TETAP			
Tanah	C.14	6.263.317.551	6.263.317.551
Peralatan dan Mesin	C.15	78.122.917.521	46.350.966.244
Gedung dan Bangunan	C.16	15.310.155.758	15.243.825.758
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	2.323.630.762	2.100.578.762
Aset Tetap Lainnya	C.18		-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	10.000.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(78.450.658.457)	(44.186.174.056)
Jumlah Aset Tetap		23.569.363.135	25.782.514.259
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(78.450.658.457)	(44.186.174.056)
Jumlah Aset Lainnya		10.000.000	
JUMLAH ASET		24.053.910.725	26.003.076.636
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	26.166.864	33.188.699
Pendapatan Diterima di Muka	C.26		
Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-
Utang belum ditagihkan		-	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		26.166.864	33.188.699
JUMLAH KEWAJIBAN		26.166.864	33.188.699
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	24.027.743.861	25.969.887.937
JUMLAH EKUITAS		24.027.743.861	25.969.887.937
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		24.053.910.725	26.003.076.636

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 AUDITED DAN
2024 AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025 Audited	31 Desember 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	4.163.750
JUMLAH PENDAPATAN		-	4.163.750
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	9.963.618.662	9.008.334.550
Beban Persediaan	D.3	97.348.527	377.227.567
Beban Barang dan Jasa	D.4	14.455.009.654	9.356.113.160
Beban Pemeliharaan	D.5	2.437.268.426	2.875.079.568
Beban Perjalanan Dinas	D.6	997.088.120	4.318.865.706
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7		
Beban Bantuan Sosial	D.8		
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	5.025.843.615	5.314.640.591
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10		-
JUMLAH BEBAN		32.976.177.004	31.250.261.142
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(32.976.177.004)	(31.246.097.392)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/Defisit Penjualan Aset Nonlancar		(207.705.800)	(330.304.839)
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Defisit Selisih Kurs			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Surplus/ Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya		304.281.800	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		96.576.000	(330.304.839)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(32.879.601.004)	(31.576.402.231)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(32.879.601.004)	(31.576.402.231)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 AUDITED DAN
2024 AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025 Audited	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL	E.1	25.969.887.937	24.065.064.343
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(32.879.601.004)	(19.808.141.534)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(987.466.362)	1.344.502
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3	155.629.628	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	(1.143.095.990)	1.331.252
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	13.250
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	31.924.923.290	33.479.881.323
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(1.942.144.076)	1.904.823.594
EKUITAS AKHIR	E.6	24.027.743.861	25.969.887.937

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2024 tentang Rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029, disebutkan salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional.

Visi KKP adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Mandiri dimaksudkan kedepan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. *Maju* dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. *Kuat* diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis

kepentingan nasional dimaksudkan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Misi KKP

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2025-2029, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Entitas berkedudukan di Jalan Indra Budiman No. 12 Desa Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Secara umum wilayah kerja operasional kegiatan Pengawasan SDKP Lampulo mencakup WPPNRI 571 dan WPPNRI 572 dengan 5 Satuan Pengawasan (Satwas) SDKP yaitu: Satwas Aceh Barat, Satwas Simeulu, Satwas Sibolga, Satwas Padang, dan Satwas Bengkulu.

Visi pembangunan Kelautan dan Perikanan Pangkalan PSDKP Lampulo 2025-2029 yaitu “Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP di WPPNRI 572 yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan, maka dirumuskan **Misi** Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025-2029:

1. Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
2. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
3. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.

Kantor Pangkalan PSDKP Lampulo mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tata tertib peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. Berdasarkan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, Pangkalan PSDKP Lampulo telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Pangkalan PSDKP Lampulo telah menetapkan 9 Sasaran Kegiatan (SK), yaitu: ⁽¹⁾ Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif; ⁽²⁾ Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai

ketentuan; ⁽³⁾ Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan; ⁽⁴⁾ Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan; ⁽⁵⁾ Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif; ⁽⁶⁾ Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan; ⁽⁷⁾ Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan; ⁽⁸⁾ Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif; ⁽⁹⁾ Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pangkalan PSDKP Lampulo beserta dengan satuan pengawasan (satwas) dan wilayah kerja (wilker) memiliki jumlah pegawai sebanyak 105 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Kerja	PNS/ASN	PPPK	PPNPN	PJLP
1	Pangkalan PSDKP Lampulo	25	10	13	14
2	Satwas SDKP Aceh Barat	3	-	3	-
3	Satwas SDKP Simeulue	2	1	1	1
4	Satwas SDKP Sibolga	5	1	2	-
5	Satwas SDKP Padang	4	2	1	2
6	Satwas SDKP Bengkulu	3	1	-	-
7	KP. Hiu 12	9	2	-	-
Jumlah		51	20	17	17

Sementara itu, untuk sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain: Gedung Kantor, Mess, Gedung Kantor Satwas, Kapal Pengawas Hiu 12 dan Hiu Macan 05, *speedboat* dan RIB. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat

transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 telah mengacu

pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pangkalan PSDKP Lampulo adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas

pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - 2) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	0%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	0%
Macet	✓ Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	0%
	✓ Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - 1) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
- Persediaan Suku Cadang Kapal
 - 1) Suku cadang kapal sesuai karakteristiknya tetap dicatat sebagai persediaan;
 - 2) KKP perlu membuat kartu kendali persediaan suku cadang serta melakukan stok opname fisik pada akhir periode baik yang ada di gudang maupun yang ada dikapal.
 - 3) Sehubungan dengan Implementasi Metode Penilaian Persediaan secara *First In First Out* (FIFO) di tahun 2021 sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2021 tanggal 22 Januari 2021, maka pencatatan transaksi mutasi persediaan baik persediaan masuk dan persediaan keluar agar dilakukan sesuai dengan urutan kronologis transaksi.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau dibawah dari Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*);
 - 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari dari Rp25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - 3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah,

Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2019 dan 2020. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan

menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang.

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

A. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

B. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pangkalan Pengawasan SDKP Lampulo memperoleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan Nomor SP DIPA-032.05.2.065135/2025. Selama tahun 2025 yang berakhir 31 Desember 2025 Pangkalan PSDKP Lampulo telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak **21** (dua puluh satu) kali dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Revisi Pertama** pada tanggal 13 Januari 2025 dengan tema revisi permintaan pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan sesuai dengan Surat Usulan Revisi: B.60/PSDKPLan.1/KU-510/I/2025 Tanggal 10 Januari 2025.

Rincian revisi adalah Pengeseran belanja gaji/honor/jasa PJLP lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo tahun 2025 yang berdasarkan nota dinas sekretaris Jenderal KKP Nomor: 1428/SJ/KP.320/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 hal penggajian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) di Lingkup.

pergeseran anggaran dalam 1 RO untuk jenis belanja yang sama yaitu Kebutuhan sehari-hari (002/A/521111) sebesar Rp439.569.000 ke Kebutuhan sehari-hari (002/A/522191) sebesar Rp439.569.000.

- 2. Revisi Kedua** pada tanggal 06 Februari 2025 berupa permintaan pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan sesuai dengan Surat Usulan Revisi: B.308/PSDKPLan.1/RC.420/II/2025 Tanggal 06

Februari 2025. Rincian pada revisi kali ini adalah sebagai berikut:

1. Revisi pada KRO 2351.AEA.002.052.A.524111 (Belanja perjalanan dinas biasa) berupa penambahan item belanja sebesar Rp2.800.000 dan pengurangan pada KRO 2351.AEA.002.052.A.524114 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota) dari nilai sebelumnya Rp15.800.000 menjadi sebesar Rp13.000.000. Usulan revisi pergeseran anggaran ini akan dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan operasional rapat koordinasi TPKP di daerah dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan.
2. Revisi pengurangan dilakukan pada KRO 2352.QIC.002.052.H.524119 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota) dari nilai Rp45.760.000 menjadi Rp10.486.000. Penambahan pada KRO 2352.QIC.002.052.H.524111 (Belanja Perjalanan Dinas Biasa) senilai Rp35.274.000. Usulan revisi pergeseran anggaran ini dialokasikan untuk penambahan belanja perjalanan dinas kegiatan pengawasan usaha perikanan berbasis risiko dalam rangka pelaksanaan dan tindak lanjut pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan.
3. Revisi pada KRO 2355.EBA.956.052.C.524111 (Belanja perjalanan dinas biasa) berupa penambahan item belanja sebesar Rp690.000 dan pengurangan pada KRO 2355.EBA.956.052. A.524119 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota) dari

nilai sebelumnya Rp16.644.000 menjadi sebesar Rp9.954.000. Usulan revisi pergeseran anggaran ini akan dialokasikan untuk mendukung Pemindahtanganan BMN Lingkup Ditjen PSDKP dan meningkatkan layanan BMN.

4. Revisi pada KRO 2355.EBD.955.052.A.524111 (Belanja perjalanan dinas biasa) berupa penambahan item belanja sebesar Rp36.267.000 dan pengurangan pada KRO 2355.EBD.955.052. A.524119 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota) dari nilai sebelumnya Rp68.976.000 menjadi sebesar Rp32.709.000. Usulan revisi pergeseran anggaran ini akan dialokasikan untuk mendukung Laporan Keuangan Satker Pangkalan PSDKP Lampulo dan meningkatkan layanan manajemen keuangan.
5. Revisi pada KRO 2355.EBD.961.052.A.524111 (Belanja perjalanan dinas biasa) berupa penambahan item belanja sebesar Rp2.640.000 dan pengurangan pada KRO 2355.EBD.961.052. A.524119 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota) dari nilai sebelumnya Rp16.160.000 menjadi sebesar Rp13.520.000. Usulan revisi pergeseran anggaran ini akan dialokasikan untuk mendukung Pengelolaan Kinerja Organisasi Ditjen PSDKP dan meningkatkan Layanan Reformasi Kinerja.

3. Revisi Ketiga tanggal 21 Februari 2025 dengan tema Usulan Revisi Anggaran Ditjen PSDKP Tahun 2025 dilakukan merujuk pada Surat Usulan Revisi: B.964/DJPSDKP/RC.420/II/2025 Tanggal 19 Februari 2025. Rincian revisi pagu yang diblokir sebagai berikut:

1. 2350 Operasi Armada serta Pembangunan Prasarana dan Sarana PSDKP meliputi:
 - a. Semula
Pagu Rp7.855.548.000;
Blokir Rp6.913.519.000;
 - b. Menjadi
Pagu Rp17.855.548.000;
Blokir Rp13.540.578.000;
Sehingga selisih blokir sebesar Rp6.627.059.000.
2. 2351 Penanganan Pelanggaran sektor Kelautan dan Perikanan meliputi:
 - a. Semula
Pagu Rp256.615.000;
Blokir Rp88.117.000;
 - b. Menjadi
Pagu Rp256.615.000;
Blokir Rp207.230.000;
Sehingga selisih blokir sebesar Rp119.113.000.
3. 2352 Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan meliputi:
 - a. Semula
Pagu Rp1.086.956.000;
Blokir Rp571.285.000;
 - b. Menjadi
Pagu Rp1.086.956.000;
Blokir Rp948.503.000;
Sehingga selisih blokir sebesar Rp377.218.000
4. 2353 Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan meliputi:

a. Semula

Pagu Rp300.000.000;

Blokir Rp94.332.000;

b. Menjadi

Pagu Rp300.000.000;

Blokir Rp300.000.000;

Sehingga selisih blokir sebesar Rp205.668.000

5. 2355.Dukungan Manajemen Internal Lingkup Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan meliputi:

a. Semula

Pagu Rp4.975.102.000;

Blokir Rp752.027.000;

b. Menjadi

Pagu Rp4.975.102.000;

Blokir Rp3.621.917.000;

Sehingga selisih blokir sebesar Rp2.869.890.000

Adapun sumber anggaran berasal dari Rupiah Murni (RM) dan PNPB dengan komposisi seperti berikut:

1. Rupiah Murni

- Semula

a. Pagu Rp28.606.804.000

b. Blokir Kode 2 Rp496.667.000

c. Blokir Kode A Rp2.016.462

d. Total Blokir (Kode 2 dan A) Rp2.513.129.000

- Menjadi

a. Pagu Rp28.606.804.000

b. Blokir Kode 2 Rp. –

c. Blokir Kode A Rp12.712.077.000

d. Total Blokir (Kode 2 dan A) Rp12.712.077.000.

2. PNB

- Semula

- a. Pagu Rp6.402.818.000
- b. Blokir Kode 2 Rp6.402.818.000
- c. Blokir Kode A Rp. –
- d. Total Blokir (Kode 2 dan A) Rp6.402.818.000

- Menjadi

- a. Pagu Rp. 6402.818.000
- b. Blokir Kode 2 Rp2.520.756.000
- c. Blokir Kode A Rp3.882.062.000
- d. Total Blokir (Kode 2 dan A) Rp6.402.818.000

Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah:

1. Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV.A (Blokir)

Tindak lanjut dari Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Tindaklanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, nilai efisiensi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2.120.355.524.000 terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp1.742.804.989.000 dan Belanja Modal Rp377.550.535.000 dari Pagu KKP sebesar Rp6.220.563.824.000. Ditjen PSDKP mendapatkan efisiensi anggaran sebesar Rp398.458.464.000

terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp380.070.553.000 dan Belanja Modal sebesar Rp18.387.911.000. Pasca efisiensi anggaran, Pagu efektif

2. Perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA pada semua satker yang melakukan revisi anggaran.

4. Revisi Keempat tanggal 28 Februari 2025 dengan tema revisi permintaan pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan dilakukan merujuk pada Surat Usulan Revisi: B. B.426.PSDKPLan.1/RC.420.II/2025 Tanggal 27 Februari 2025.

Rincian revisi keempat berupa pergeseran belanja barang antara lain:

1. 2350.QHD.001 Operasional Kapal Pengawas
 - Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas (052/A) Akun 52 sebesar Rp488.050.000 ke Penyediaan Dukungan Logistik Lainnya (052/B) dan Penyediaan Logistik Kapal Darat (052/C) Akun 52 sebesar Rp488.050.000.
2. 2355.EBA.994 Layanan Perkantoran
 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor, Kebutuhan sehari-hari perkantoran, Layanan Daya dan Jasa (022/A, dan B) Akun 52 sebesar Rp8.390.000 dan Rp32.400.000 menjadi Pemeliharaan Kantor (Gedung, Kendaraan, dll) (022/C Akun 52 sebesar Rp40.790.000.

Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah:

Pergeseran anggaran pada jenis belanja yang sama (52) dalam rangka memenuhi kebutuhan pemeliharaan Gedung Kantor Pangkalan PSDKP Lampulo.

5. Revisi Kelima tanggal 15 Maret 2025 dengan tema revisi permintaan pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan dilakukan merujuk pada Surat Usulan Revisi: B.528/PSDKPlan.1/RC.420/III/2025 Tanggal 12 Maret 2025.

Rincian revisi kelima berupa pergeseran belanja barang antara lain:

1. 2350.QHD.001 Operasi Kapal Pengawas

- Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas (052/A) Akun 52 sebesar Rp. 286.859.000 ke Penyediaan Dukungan Logistik Lainnya (052/B) dan Penyediaan Logistik Kapal Darat (052/C) Akun 52 sebesar Rp286.859.000.

Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah:

Pergeseran anggaran pada jenis belanja yang sama (52) dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Delegasi KP HIU 12 dan KP Macan 05, Kebutuhan sehari-hari Kapal Pengawas, Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Kapal Pengawas, Nataru, dan Uang Jaga Sandar Kapal Pengawas.

6. Revisi Keenam tanggal 24 Maret 2025 dengan tema Usulan Revisi Anggaran Ditjen PSDKP TA 2025 dilakukan merujuk pada Surat Usulan Revisi: B.243/DJPSDKP/RC.420/III/2025 Tanggal 21 Maret 2025.

Rincian revisi keempat berupa pergeseran belanja barang antara lain:

a. 2352.999 Cadangan

Cadangan (999/A sampai dengan K) sebesar Rp496.667.000 menjadi 2352.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga sebesar Rp496.667.000.

Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah:

- 1) Substansi usul revisi anggaran yang diusulkan oleh KPA lingkup Ditjen. PSDKP berupa (i) Penambahan/Pengurangan Alokasi dan/atau Target RO Prioritas Nasional dari RO Cadangan; (ii)Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV.A (Blokir) dan (iii) Perubahan rencana penarikan dana;
- 2) Penambahan/Pengurangan Alokasi dan/atau Target RO Prioritas Nasional dari RO Cadangan yang merupakan tindaklanjut dari telah diterbitkannya izin pelampauan SBK TA 2025 lingkup KKP melalui Surat Izin Pelampauan SBK dari Kementerian Keuangan nomor S-37/MK.2/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Izin Pelampauan Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 3) Pencantuman/Penghapusan/ Perubahan Catatan Halaman IV.A (Blokir) pada pergeseran anggaran dari RO Cadangan ke RO yang telah mendapatkan izin pelampauan SBK TA 2025; dan
- 4) Penyesuaian rencana penarikan dana (RPD) halaman III DIPA semua satker yang melakukan revisi anggaran.

7. Revisi Ketujuh tanggal 14 April 2025 dengan tema Usulan Revisi Anggaran Ditjen PSDKP TA 2025, dilakukan merujuk pada Surat Usulan Revisi: B.251/PSDKPLan.1/RC.420/III/2025 Tanggal 25 Maret 2025.

Rincian revisi pagu yang diblokir sebagai berikut:

1. Program HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan meliputi:

a. Semula

Pagu Rp8.546.388.000;

Blokir Rp4.878.781.000;

b. Menjadi

Pagu Rp8.546.388.000;

Blokir Rp409.252.000;

Sehingga selisih blokir sebesar Rp4.469.205.000.

2. Program WA Program Dukungan Manajemen meliputi:

a. Semula

Pagu Rp389.400.000;

Blokir Rp229.440.000;

b. Menjadi

Pagu Rp389.400.000;

Blokir Rp58.764.000;

Sehingga selisih blokir sebesar Rp170.676.000.

Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah:

1) Substansi usul revisi anggaran yang diusulkan oleh KPA lingkup Ditjen. PSDKP berupa (i) Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV.A (blokir) dan (iii) Perubahan rencana penarikan dana;

- 2) Usul revisi anggaran Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV.A (Blokir) yang berupa buka blokir kode-A pada kegiatan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002); dan
- 3) Penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) halaman III DIPA semua satker yang melakukan revisi anggaran.

8. Revisi Ke Delapan pada tanggal 09 Mei 2025 dengan tema revisi permintaan pemutakhiran data Petunjuk Operasional Kegiatan dilakukan merujuk pada Surat Usulan Revisi: B.797/PSDKPLan.1/RC.420/V/2025 Tanggal 9 Mei 2025.

Rincian pada revisi keempat berupa pergeseran belanja barang antara lain:

1. 2350.QHD.001 Operasional Kapal Pengawas:
 - Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas Penyediaan Dukungan Logistik Lainnya (052/B) sebesar Rp. 126.000.000 dan Penyediaan Logistik Awak Kapal Pengawas (052/C) Akun 52 sebesar Rp. 602.897.000 ke Penyediaan Logistik Kapal Pengawas KP HIU MACAN 05 dan KP HIU 12 (052/A) sebesar Rp677.597.000 dan penambahan sub komponen baru yaitu Dukungan operasional kegiatan prioritas nasional lintas kementerian/ Lembaga (052/F) sebesar Rp51.300.000.
2. 2350.RCG.001 Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat:
 - Perawatan Darurat Kapal Pengawas (052/C) Akun 52 sebesar Rp. 150.124.000, Perawatan

Pencegahan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/ Rubber Boat (052/D) Akun 52 sebesar Rp8.400.000 dan Perawatan Prediktif Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/ Rubber Boat (052/E) Akun 52 sebesar Rp108.500.000 ke Perawatan Pencegahan Kapal Pengawas (052/A) Akun 52 sebesar Rp282.000.000 dan Perawatan Prediktif Kapal Pengawas (052/B) Akun 52 sebesar Rp55.752.000.

3. 2352.QIC.001 Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya:

- Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya (052/A) Akun 52 sebesar Rp3.075.000, Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha Pemanfaatan Ruang laut yang diperiksa kepatuhannya (052/B) Akun 52 sebesar Rp1.517.000, Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya (052/C) Akun 52 sebesar Rp4.500.000, Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya (052/D) Akun 52 sebesar Rp4.510.000, dan Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya yang diperiksa kepatuhannya (052/E) Akun 52 sebesar Rp7.500,

000 ke sub komponen baru yaitu Pengawasan SDK (052/G) Akun 52 sebesar Rp21.102.000.

4. 2355.EBA.956 Layanan BMN:

- Penatausahaan BMN Lingkup Ditjen. PSDKP (052/A) Akun 524119 sebesar Rp750.000 ke Penatausahaan BMN Lingkup Ditjen. PSDKP (052/A) Akun 524113 sebesar Rp750.000

5. 2355.EBA.962 Layanan Umum:

- TANPA SUB KOMPONEN (052/A) Akun 524111 sebesar Rp1.500.000 ke TANPA SUB KOMPONEN (052/A) Akun 524113 sebesar Rp1.500.000.

6. 2355.EBA.994 Layanan Perkantoran:

- Tunjangan Kinerja PPPK (001/D) Akun 51 sebesar Rp3.714.000 ke Pembayaran Gaji (001/A) Akun 51 sebesar Rp224.000. Tunjangan Kinerja PNS (001/B) Akun 51 sebesar Rp2.980.000 dan Pembayaran Gaji PPPK (001/C) Akun 51 sebesar Rp510.000.
- Layanan Daya dan Jasa (002/B) Akun 52 sebesar Rp30.040.000 Kebutuhan sehari-hari perkantoran (002/A) Akun 52 sebesar Rp22.700.000 dan Pemeliharaan Kantor (Gedung, Kendaraan, dll) (002/C) Akun 52 sebesar Rp7.340.000.

7. 2355.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal:

- Layanan Reformasi Kinerja (2355.EBD.961/052/A) Akun 52 sebesar Rp40.000 ke Layanan Manajemen Keuangan (2355.EBD.955/052/A) Akun 52 sebesar Rp40.000.

Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah:

- 1) Penambahan sub komponen dalam rangka kegiatan kunjungan DPR RI Komisi IV ke Kota Sabang;
- 2) Pergeseran bertujuan untuk pemenuhan kegiatan perbaikan KP HIU 12 berupa penggantian plat body kapal yang mengalami kebocoran dan perbaikan lainnya guna stabil Kembali pengoperasional KP HIU 12;
- 3) Pergeseran bertujuan untuk memastikan kegiatan pengawasan SDK berjalan akibat dari penghematan anggaran serta terbatas;
- 4) Pergeseran bertujuan untuk mengakomodir kegiatan dalam kota berupa transportasi lokal;
- 5) Pergeseran bertujuan untuk menambah anggaran transportasi lokal dalam pelaksanaan tugas administrasi pada layanan umum;
- 6) Pergeseran bertujuan untuk mengatasi pagu minum pada belanja pegawai;
- 7) Pergeseran bertujuan untuk optimalisasi anggaran.

9. Revisi Kesembilan pada tanggal 23 Mei 2025 dengan tema revisi Usulan Revisi Anggaran Ditjen PSDKP TA 2025 dilakukan merujuk pada Surat Usulan Revisi: B.388/DJPSDKP/RC.420/V/2025 Tanggal 21 Mei 2025.

Rincian pada revisi kali ini berupa buka blokir PNBK antara lain:

1. 2350.QHD.001 Operasi Kapal Pengawas

- Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas/ Penyediaan Logistik Kapal Pengawas KP HIU MACAN 05 dan KP HIU 12 (052/A).
 - a) Blokir sebesar Rp3.639.063.000 meliputi Bahan Bakar Minyak (PNBP) dan Pelumas (PNBP) menjadi Buka Blokir sebesar Rp3.639.063.000 meliputi Bahan Bakar Minyak (PNBP) dan Pelumas (PNBP).
- Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas/PNBP (052/E).
 - a) Blokir sebesar Rp2.520.756.000 meliputi Bahan Bakar Minyak (PNBP), Pelumas (PNBP), Ongkos Angkut BBM (PNBP), Biaya Delegasi Kp. Hiu 12 (PNBP), dan Biaya Delegasi Kp. Hiu Macan 05 (PNBP) menjadi Buka Blokir sebesar Rp2.520.756.000 meliputi Bahan Bakar Minyak (PNBP), Pelumas (PNBP), Ongkos Angkut BBM (PNBP), Biaya Delegasi Kp. Hiu 12 (PNBP), dan Biaya Delegasi Kp. Hiu Macan 05 (PNBP).

Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah:

Buka Blokir kode 2 pada kegiatan Operasi Kapal Pengawas sumber dana PNBP sebesar Rp6.402.818.000 , Kementerian Keuangan telah menyetujui penggunaan PNBP pemanfaatan SDA Perikanan melalui surat Menteri Keuangan nomor S-328/MK.02/2025 Tanggal 11 Mei 2025 perihal persetujuan Penggunaan Dana PNBP Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2025 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

10. Revisi Kesepuluh pada tanggal 17 Juni 2025 dengan tema revisi Penetapan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) atas Revisi Anggaran dilakukan merujuk pada Surat Usulan Revisi: B.929/PSDKPLan.1/RC.420/VI/2025 Tanggal 12 Juni 2025.

Rincian pada revisi ke-sepuluh berupa pergeseran antar jenis belanja antara lain:

1. 2350.QHD.001 Operasi Kapal Pengawas

- Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas/ Penyediaan Logistik Kapal Pengawas KP HIU MACAN 05 dan KP HIU 12 (052/A) Akun 52 sebesar Rp392.000.000. ke Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas/ Penyediaan Logistik Kapal Pengawas KP HIU MACAN 05 dan KP HIU 12 (052/A) Akun 53 sebesar Rp392.000.000.

Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah

Pergeseran antar jenis belanja yang semula 52 (Belanja Barang) menjadi 53 (belanja modal) bertujuan untuk pemenuhan listrik darat Kapal Pengawas di 2 (dua) lokasi yaitu Padang dan Sibolga sebesar Rp392.000.000. Pembangunan atau pemasangan baru listrik merupakan upaya dalam penghematan biaya operasional Kapal Pengawas terutama penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) sehingga mengurangi emisi dan biaya BBM sendiri.

11. Revisi Kesebelas tanggal 7 Juli 2025 dengan tema usulan revisi anggaran (revisi Kanwil) dilakukan merujuk pada Surat Usulan Revisi Nomor

B.1098/PSDKPLan.1/RC.420/VII/2025 Tanggal 7 Juli 2025.

Rincian pada revisi kesebelas berupa Pemutakhiran data POK dan perubahan RPD Halaman III DIPA antara lain:

1. 2350.QHD.001 Operasional Kapal Pengawas
 - Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas/ Penyediaan Logistik Kapal Pengawas KP HIU MACAN 05 dan KP HIU 12 (052/A), Penyediaan Logistik Awak Kapal Pengawas (052/C) pengeseran penggabungan anggaran PNBPN kedalam satu sub komponen ke Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas/PNBPN (052/E) senilai Rp3.882.062.000.
2. 2350.QHD.001 Operasional Kapal Pengawas
 - Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas/ Penyediaan Logistik Awak Kapal Pengawas (052/C) Akun 52 sebesar Rp10.000.000, dan Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas/ Medical Check Up Awak Kapal Pengawas (052/D) Akun 52 sebesar Rp27.090.000 ke Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas/ Dukungan Penyelesaian TPKP (052/G) sebesar Rp37.090.000.
3. 2350.RCG.001 Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat
 - Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas/ Perawatan Pencegahan Kapal Pengawas (052/A) Akun 52 sebesar Rp7.200.000 ke Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas/ Perawatan

Pencegahan Kapal Pengawas (052/A) Akun 52 sebesar Rp7.200.000.

4. 2351.BCE Penanganan Perkara

- Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administrative/ Pelaksanaan Pengenaan Sanksi Administratif/ Pelaksanaan Perkara Sanksi Administratif (2351.BCE.U03/ 052/B) Akun 52 sebesar Rp1.560.000 ke Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana/ Pemberkasan Perkara TPKP/ Administrasi Penyidikan Pemberkasan Perkara TPKP (2351.BCE.U04/ 052/A) Akun 52 sebesar Rp1.560.000.

5. 2352.QIC.002 Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya.

- Pelaksanaan dan Tindak lanjut pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan/Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (052/I) Akun 52 sebesar Rp3.686.000 ke Pelaksanaan dan Tindak lanjut pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan/ Dukungan Penyelesaian TPKP (052/K) Akun sebesar Rp3.686.000.

6. 2355.EBA.994 Layanan Perkantoran

- Gaji dan Tunjangan/ Pembayaran Gaji (001/A) Akun 51 sebesar Rp2.179.000 ke Gaji dan Tunjangan/Pembayaran Gaji (001/A) Akun 51 sebesar Rp2.179.000 (pagu minus).

Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah:

- a) Tidak tersediannya anggaran cukup dalam menyelesaikan TPKP pada KRO RO 2351 sehingga dimunculkan anggaran untuk menyelesaikan pertanggungjawaban TPKP pada KRO RO 2350 sebesar Rp37.090.000;
- b) Terdapat pagu minus pada belanja pegawai sehingga dilakukan penyesuaian pagu dalam hal pagu tetap belanja pegawai; dan
- c) Perubahan RPD Hal III DIPA untuk meningkatkan nilai IKPA Pangkalan PSDKP Lampulo.

12. Revisi Keduabelas pada tanggal 31 Juli 2025 dengan tema revisi Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan dilakukan merujuk pada Surat Usulan Revisi: B.1247/PSDKPLan.1/RC.420/VII/2025 Tanggal 31 Juli 2025.

Rincian pada revisi keduabelas berupa Pengeseran belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai antara lain:

1. 2350.RCG.001 Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat
 - Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas/ Perawatan Prediktif Kapal Pengawas pada jenis belanja modal berupa Pengadaan Perlengkapan Kapal Pengawas sebesar Rp40.809.000 dilakukan pendetailan atas jenis belanja modal yang akan di belanjakan meliputi Pengadaan AC. Split sebesar Rp20.000.000, dan Pengadaan Perlengkapan Kapal Pengawas sebesar Rp20.809.000.
2. 2352.QIC.001 Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya.

- Pengawasan SDK berupa Transportasi Lokal Dalam Rangka Pengawasan SDK Lingkup Kerja Pangkalan PSDKP Lampulo sebesar Rp1.020.000 ke Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengawasan SDK Lingkup Kerja Pangkalan PSDKP Lampulo sebesar Rp1.020.000.

3. 2355.EBA.994 Layanan Perkantoran.

- Tunjangan Kinerja PNS dilakukan pengurangan pagu sebesar Rp52.212.000 ke Pembayaran Gaji sebesar Rp52.212.000;
- Tunjangan Kinerja PPPK dilakukan pengurangan pagu sebesar Rp39.828.000 ke Pembayaran Gaji PPPK sebesar Rp39.828.000.
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor Layanan Daya dan Jasa dilakukan pengurangan pagu sebesar Rp8.268.000 ke Kebutuhan sehari-hari perkantoran sebesar Rp8.268.000 untuk memunculkan akun belanja bahan seperti Cetak Spanduk dan Konsumsi Rapat Biasa.

Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah:

- a) Pembentukan detail pada belanja modal bertujuan untuk pemenuhan pengadaan AC Split kebutuhan ruang pertemuan sementara Kantor Pangkalan PSDKP Lampulo sebanyak 2 (dua) Unit;
- b) Pergeseran pagu pada belanja 524 translok ke perjalanan dinas biasa dikarenakan pertanggungjawaban perjalanan dinas biasa tidak mencukupi pagu sehingga pemenuhan kekurangan digeser dari 524 perjalanan dinas dalam kota.

- c) Terdapat beberapa akun belanja pegawai yang minus sehingga dilakukan penyesuaian Kembali pagu belanja pegawai.
- d) Pembentukan akun belanja bahan dikarenakan kebutuhan cetak spanduk dan kegiatan rapat yang membutuhkan konsumsi rapat.

13. Revisi Ketigabelas tanggal 28 Agustus 2025 dengan tema Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan dilakukan merujuk Surat Usulan Revisi B.1542/PSDKPLan.1/RC.420/VIII/2025 tanggal 27 Agustus 2025.

Rincian pada revisi ketigabelas berupa Pengeseran belanja barang antara lain:

1. 2350.QHD.001 Operasi Kapal Pengawas
 - Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas pada Dukungan Penyelesaian TPKP sebesar Rp11.358.000 ke Penyediaan Dukungan Logistik Lainnya sebesar Rp9.750.000 dan Penyediaan Logistik Awak Kapal Pengawas sebesar Rp1.608.000.
2. 2350.RCG.001 Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat.
 - Perawatan Pencegahan Kapal Pengawas pengurangan pagu sebesar Rp269.420.000 ke Perawatan Darurat Kapal Pengawas sebesar Rp151.192.000, Perawatan Pencegahan *Speedboat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat* sebesar Rp50.000.000, Perawatan Prediktif *Speedboat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat* sebesar Rp42.500.000, dan Perawatan Darurat

Speedboat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat
sebesar Rp25.728.000.

3. 2351.BCE Penanganan Perkara:

- Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif/Pelaksanaan Pengenaan Sanksi Administratif digeser sebesar Rp2.830.000 ke Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana/Pemberkasas Perkara TPKP sebesar Rp2.830.000.

4. 2355.EBA.956 Layanan BMN:

- Pelaksanaan Pengelolaan BMN pada Perjalanan dinas dalam kota dilakukan pergeseran sebesar Rp750.000 ke perjalanan dinas biasa sebesar Rp750.000.

5. 2355.EBA.994 Layanan Perkantoran:

- Operasional dan Pemeliharaan Kantor pada Layanan Daya dan Jasa dan Pemeliharaan Kantor (Gedung,Kendaraan,dll) dilakukan pengeseran/ pengurangan sebesar Rp17.369.000 ke Kebutuhan sehari-hari perkantoran sebesar Rp17.369.000.

6. 2355.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal:

- Layanan Reformasi Kinerja/ Fasilitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Lomba Inovasi Ditjen. PSDKP 2025 dilakukan pergeseran/ pengurangan pagu sebesar Rp1.110.000 ke Layanan Manajemen Keuangan/ Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan/ Laporan Keuangan Satker Pangkalan PSDKP Lampulo sebesar Rp1.110.000.

Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah:

- a) Pergeseran antar sub komponen dikarenakan dukungan penyelesaian pertanggungjawaban TPKP terdapat sisa anggaran untuk dimanfaatkan ke sub komponen lainnya meliputi belanja Konsumsi rapat persiapan/evaluasi gelar operasi, ATK, Biaya Delegasi Kp. Hiu 12 (RM), dan Perdin dalam rangka supervisi.
- b) Pergeseran untuk memenuhi kebutuhan meliputi Perawatan Darurat Kapal Pengawas (Hiu 12 dan Hiu Macan 05), Docking Napoleon 08, Pengadaan Suku Cadang dan Perlengkapan Rigid Inflatable Boat, Perawatan Darurat Rigid Inflatable Boat, dan Perawatan Darurat Napoleon 08.
- c) Pergeseran untuk memenuhi kebutuhan penyelesaian pertanggungjawaban TPKP meliputi: Biaya Konsumsi Rapat dalam rangka Monev, Transportasi lokal Kuasa Hukum, dan Honorarium Petugas Penanganan Barang Bukti TPKP.
- d) Pergeseran untuk memenuhi kebutuhan Uang Harian dalam rangka supervisi pengurusan sertifikat lahan kantor Satwas SDKP Aceh Barat.
- e) Pergeseran untuk memenuhi kekurangan kebutuhan Jamuan Delegasi Tamu, pagu minus (G Driver/Google One, Penerbitan Kartu Izin Daerah Keamanan Terbatas), dan penambahan anggaran ATK dan CS.
- f) Pergeseran antar RO untuk memenuhi kebutuhan Perdin dalam rangka penyelesaian sertifikat kantor Satwas SDKP Aceh.

14. Revisi Keempatbelas pada tanggal 1 Oktober 2025 dengan tema Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan dilakukan merujuk pada Surat Usulan Revisi: B.1820/PSDKPLan.1/RC.420/X/2025 Tanggal 1 Oktober 2025.

Rincian pada revisi keempatbelas berupa pengeseran belanja barang antara lain:

1. 2350.QHD.001 Operasi Kapal Pengawas

- Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas/ Penyediaan Logistik Kapal Pengawas KP HIU MACAN 05 dan KP HIU 12 dilakukan pergeseran pagu sebesar Rp2.538.962.000 dan Dukungan operasional kegiatan prioritas nasional lintas kementerian/Lembaga sebesar Rp17.797.000 sehingga total pergeseran sebesar Rp2.556.724.000 ke Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas/ Penyediaan Logistik Awak Kapal Pengawas sebesar Rp17.832.000. Dukungan Operasional Kapal Pengawas (Kelas II,III dan V) dan RIB sebesar Rp2.151.667.000, Operasional Speedboat Pengawas (KP Kelas V Napoleon) sebesar Rp145.800.000, Operasional Speedboat Pengawas (KP Kelas V Baramundi 01) sebesar Rp72.180.000, Operasional Speedboat Pengawas (RIB) sebesar Rp72.180.000 dan Pakaian Dinas KP dan Pegawai sebesar Rp97.100.000.

Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah:

- a) Pergeseran anggaran bersumber dari BBM Kapal Pegawai Rupiah Murni untuk mendukung kebutuhan Jamuan Delegasi Tamu, Pemeliharaan

Kapal Pengawas dan *Speedboat* Pengawas, Hari Operasi Speedboat Pegawai sebanyak 10 (sepuluh), dan Pengadaan Seragam.

- b) Pergeseran anggaran tersebut telah mendapatkan persetujuan Direktorat Jenderal PSDKP berdasarkan Nota Dinas Nomor 1561/DJPSDKP.1/RC.420/IX/2025 Tanggal 29 September 2025 Perihal Tanggapan Permohonan Usulan Revisi Anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo No. Surat B.1651/PSDKPLan.1/RC.420/IX/2025 Tanggal 11 September 2025 perihal Permohonan Persetujuan Usulan Revisi DIPA Sumber Dana Rupiah Murni.

15. Revisi Kelimabelas pada tanggal 6 Oktober 2025 dengan tema Penetapan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) atas Revisi Anggaran (Kewenangan Kanwil) dilakukan merujuk pada Surat Usulan Revisi: B.1835/PSDKPLan.1/RC.420/X/2025 Tanggal 3 Oktober 2025.

Rincian pada revisi kelimabelas berupa Pengeseran belanja barang antara lain:

1. 2350.QHD.001 Operasi Kapal Pengawas
 - Dukungan Operasional Kapal Pengawas (Kelas II,III,dan V) dan RIB dilakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja semula 52 sebesar Rp1.985.467.000 ke 53 sebesar Rp1.985.467.000 meliputi, Perlengkapan KP HIU MACAN 05 dan KP HIU 12, Perlengkapan KP Kelas V dan RIB, Repowering KP Napoleon 045 dan Repowering KP Napoleon 08.

Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah:

- a) Pergeseran antar jenis belanja dikarenakan jenis barang pengadaan meliputi Alat Komunikasi dan Navigasi serta Mesin Kapal yang nilai perolehannya melebihi Rp1.000.000 untuk peralatan dan mesin.
- b) Revisi kali ini sekaligus dengan perubahan RPD Hal III DIPA yang bertujuan untuk meningkatkan nilai IKPA Pangkalan PSDKP Lampulo.

16. Revisi Keenambelas pada tanggal 20 Oktober 2025 dengan tema Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan dilakukan merujuk pada Surat Usulan Revisi B.1907/PSDKPLan.1/RC.420/X/2025 Tanggal 20 Oktober 2025.

Rincian pada revisi keenambelas berupa Pengeseran belanja barang antara lain:

- 1. 2350.QHD.001 Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam
 - Penyediaan Logistik Kapal Pengawas KP HIU 12 pada jenis belanja barang berupa Ongkos angkut BBM Stasioner sebesar Rp15.640.000 ke Penyediaan Dukungan Logistik Lainnya berupa penambahan Biaya langganan listirk kapal darat sebesar Rp15.640.000.
 - Pelaksanaan Logistik Kapal Pengawas KP HIU 12 pada jenis belanja modal Pembangunan Jaringan Listirk sebesar Rp30.948.000 ke belanja modal Peralatan dan Mesin berupa Kendaraan Fungsional Roda 2 (dua) sebesar Rp30.948.000, pada Dukungan Operasional Kapal Pengawas (Kelas II,III, dan V) dan RIB belanja modal

penambahan nilai Peralatan dan mesin sebesar Rp56.000.000 ke belanja modal peralatan dan mesin berupa pengadaan Alat Komunikasi, Navigasi, Meubelair dan Kendaraan Fungsional Roda 2 (dua) sebesar Rp56.000.000.

2. 2350.RCG.001 Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat.

- Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas/ Perawatan Pencegahan Kapal Pengawas pada jenis belanja barang sebesar Rp58.090.000 ke Perawatan Darurat Kapal Pengawas sebesar Rp58.090.000.
- Perawatan Prediktif Kapal pengawas pada jeinsi belanja modal meliputi penambahan detail pengadaan Printer sebesar Rp5.507.000.

3. 2352.BHD.002 Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan.

- Perencanaan kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan/ Penyusunan Rencana Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan pada jenis belanja barang sebesar Rp2.000.000 ke Pelaksanaan keigatan Oeprasi Intelijen Pengawasan Sumber Saya Perikanan/ Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi operasi intelijen sebesar Rp2.000.000 meliputi konsumsi dalam rangka bulan bakti KKP dan publikasi/spanduk/plakat.

4. 2355.EBA.994 Layanan Dukungan Manajemen Internal.

- Tunjangan Kinerja PPPK pada jenis belanja pegawai sebesar Rp65.554.000 ke Pembayaran Gaji PPPK sebesar Rp65.554.000 meliputi Gaji Pokok PPPK, Tunjangan Suami/Istri PPPK, Tunjangan Anak PPPK, Tunjangan Fungsional PPPK, Tunjangan Beras PPPK, dan Tunjangan Umum.
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor/ Kebutuhan sehari-hari perkantoran pada jenis belanja barang sebesar Rp178.691.000 ke Layanan Daya dan Jasa sebesar Rp41.776.000 dan Pemeliharaan Kantor (Gedung, Kendaraan dll) sebesar Rp136.915.000.

Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah:

- a) 1. Pergeseran anggaran belanja barang yang semula ongkos angkut bbm ke biaya langganan Listrik darat kapal bertujuan untuk memenuhi kekurangan tagihan Listrik sampai akhir tahun 2025.
2. Pergeseran anggaran belanja modal yang semula pemasangan Listrik darat kapal di dua Lokasi terdapat sisa anggaran sehingga dilakukan optimalisasi untuk pemenuhan kendaraan fungsional roda 2 (dua); dan *repowering speedboat* terdapat sisa anggaran dan dialihkan untuk pengadaan alat komunikasi. Pengelola data dan meubelair untuk memenuhi kebutuhan Pangkalan PSDKP Lampulo secara kebutuhan.
- b) 1. Pergeseran anggaran belanja barang pada perawatan untuk memenuhi kebutuhan perawatan Darurat Kapal Pengawas.

2. Penambahan detail belanja modal berupa pengadaan Printer untuk kebutuhan Pangkalan PSDKP Lampulo.
- c) Pergeseran belanja barang untuk memenuhi kebutuhan kegiatan Bulan Bhakti KKP dan kebutuhan percetakan.
- d) Pergeseran anggaran belanja pegawai PPPK untuk memenuhi kebutuhan potensi pagu minus pada komponen Gaji Pokok.

17. Revisi Ketujuhbelas pada tanggal 19 November 2025 dengan tema Usulan Revisi Anggaran Ditjen PSDKP TA 2025 Petunjuk Operasional Kegiatan, dilakukan merujuk pada Surat Usulan Revisi: B.935/DJPSDKP/RC.420/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025.

Rincian pagu yang diblokir pada revisi meliputi:

1. 2350.QHD.001 meliputi:

a. Semula

Pagu Rp14.063.328.000;

Blokir Rp393.430.000;

b. Menjadi

Pagu Efektif Rp13.669.898.000;

Tambahan anggaran Rp3.502.634.000

Blokir Rp0;

Sehingga pagu menjadi sebesar Rp17.172.532.000.

2. 2350.QHD.003 meliputi:

a. Semula

Pagu Rp610.220.000;

Blokir Rp312.749.000;

- b. Menjadi
Pagu Efektif Rp297.471.000;
Tambahan anggaran Rp0;
Blokir Rp0;
Sehingga pagu menjadi sebesar Rp297.471.000.
- 3. 2350.RBQ.001 meliputi:
 - a. Semula
Pagu Rp1.550.000.000;
Blokir Rp1.550.000.000;
 - b. Menjadi
Pagu Efektif Rp0;
Tambahan anggaran Rp0;
Blokir Rp0;
Sehingga pagu menjadi sebesar Rp0 (RO Hilang/Hapus).
- 4. 2350.RCG.001 meliputi:
 - a. Semula
Pagu Rp1.832.000.000;
Blokir Rp412.052.000;
 - b. Menjadi
Pagu Efektif Rp1.419.948.000;
Tambahan anggaran Rp0;
Blokir Rp0;
Sehingga pagu menjadi sebesar Rp1.419.948.000.
- 5. 2351.AEA.002 meliputi:
 - a. Semula
Pagu Rp50.000,000;
Blokir Rp50.000,000;
 - b. Menjadi
Pagu Efektif Rp0;

- Tambahan anggaran Rp0;
Blokir Rp.0;
Sehingga pagu menjadi sebesar Rp0 (RO Hilang/
Hapus).
6. 2351.BCE.U03 meliputi:
- a. Semula
Pagu Rp85.850.000;
Blokir Rp72.461.000;
 - b. Menjadi
Pagu Efektif Rp13.389.000;
Tambahan anggaran Rp19.000.000;
Blokir Rp0;
Sehingga pagu menjadi sebesar Rp32.389.000.
7. 2351.BCE.U04 meliputi:
- a. Semula
Pagu Rp120.765.000;
Blokir Rp84.769.000;
 - b. Menjadi
Pagu Efektif Rp35.996.000;
Tambahan anggaran Rp35.934.000;
Blokir Rp0;
Sehingga pagu menjadi sebesar Rp71.930.000.
8. 2352.BHD.001 meliputi:
- a. Semula
Pagu Rp124.747.000;
Blokir Rp104.242.000;
 - b. Menjadi
Pagu Efektif Rp20.505.000;
Tambahan anggaran Rp0;
Blokir Rp0;

Sehingga pagu menjadi sebesar Rp20.505.000.

9. 2352.BHD.002 meliputi:

a. Semula

Pagu Rp61.790.000;

Blokir Rp24.136.000;

b. Menjadi

Pagu Efektif Rp37.654.000;

Tambahan anggaran Rp0;

Blokir Rp0;

Sehingga pagu menjadi sebesar Rp37.654.000.

10. 2352.QIC.001 meliputi:

a. Semula

Pagu Rp468.000.000;

Blokir Rp435.045.000;

b. Menjadi

Pagu Efektif Rp32.955.000;

Tambahan anggaran Rp91.000.000;

Blokir Rp0;

Sehingga pagu menjadi sebesar Rp123.955.000.

11. 2352.QIC.002 meliputi:

a. Semula

Pagu Rp950.000.000;

Blokir Rp851.747.000;

b. Menjadi

Pagu Efektif Rp98.253.000;

Tambahan anggaran Rp224.000.000;

Blokir Rp0;

Sehingga pagu menjadi sebesar Rp322.253.000.

12. 2353.QDD.001 meliputi:

a. Semula

Pagu Rp300.000.000;

Blokir Rp300.000.000;

b. Menjadi

Pagu Efektif Rp0;

Tambahan anggaran Rp0;

Blokir Rp0;

Sehingga pagu menjadi sebesar Rp0 (RO Hilang/
Hapus).

13. 2355.CAN.001 meliputi:

a. Semula

Pagu Rp112.000.000;

Blokir Rp.112.000.000;

b. Menjadi

Pagu Efektif Rp0;

Tambahan anggaran Rp0;

Blokir Rp0;

Sehingga pagu menjadi sebesar Rp0 (RO Hilang/
Hapus).

14. 2355.EBA.956 meliputi:

a. Semula

Pagu Rp22.000.000;

Blokir Rp8.066.000;

b. Menjadi

Pagu Efektif Rp13.934.000;

Tambahan anggaran Rp0;

Blokir Rp0;

Sehingga pagu menjadi sebesar Rp13.934.000.

15. 2355.EBA.958 meliputi:

a. Semula

Pagu Rp23.300.000;

Blokir Rp23.000.000;

b. Menjadi

Pagu Efektif Rp0;

Tambahan anggaran Rp0;

Blokir Rp0;

Sehingga pagu menjadi sebesar Rp0 (RO Hilang/
Hapus).

16. 2355.EBA.960 meliputi:

a. Semula

Pagu Rp40.871.000;

Blokir Rp40.871.000;

b. Menjadi

Pagu Efektif Rp0;

Tambahan anggaran Rp0;

Blokir Rp0;

Sehingga pagu menjadi sebesar Rp0 (RO Hilang/
Hapus).

17. 2355.EBA.962 meliputi:

a. Semula

Pagu Rp489.973.000;

Blokir Rp384.698.000;

b. Menjadi

Pagu Efektif Rp105.275.000;

Tambahan anggaran Rp0;

Blokir Rp0;

Sehingga pagu menjadi sebesar Rp105.275.000.

18. 2355.EBA.963 meliputi:

a. Semula
Pagu Rp24.566.000;
Blokir Rp13.831.000;

b. Menjadi
Pagu Efektif Rp10.725.000;
Tambahan anggaran Rp0;
Blokir Rp0;

Sehingga pagu menjadi sebesar Rp10.725.000.

19. 2355.EBA.994.001 meliputi:

a. Semula
Pagu Rp8,499.112.000;
Blokir Rp0;

b. Menjadi
Pagu Efektif Rp8.499.112.000;
Tambahan anggaran Rp1.465.267.000
Blokir Rp0;

Sehingga pagu menjadi sebesar Rp9.964.379.000.

20. 2355.EBA.994.002 meliputi:

a. Semula
Pagu Rp4.539.491.000;
Blokir Rp1.907.425.000;

b. Menjadi
Pagu Efektif Rp2.632.066.000;
Tambahan anggaran Rp192.000.000;
Blokir Rp0;

Sehingga pagu menjadi sebesar Rp2.824.066.000.

21. 2355.EBB.951 meliputi:

a. Semula
Pagu Rp170.268.000;
Blokir Rp170.268.000;

b. Menjadi

Pagu Efektif Rp0;

Tambahan anggaran Rp0;

Blokir Rp0;

Sehingga pagu menjadi sebesar Rp0 (RO Hilang/
Hapus).

22. 2355.EBC.954 meliputi:

a. Semula

Pagu Rp170.411.000;

Blokir Rp154.875.000;

b. Menjadi

Pagu Efektif Rp15.536.000;

Tambahan anggaran Rp0;

Blokir Rp0;

Sehingga pagu menjadi sebesar Rp15.536.000.

23. 2355.EBD.952 meliputi:

a. Semula

Pagu Rp187.936.000;

Blokir Rp187.936.000;

b. Menjadi

Pagu Efektif Rp0;

Tambahan anggaran Rp0;

Blokir Rp187.936.000;

Sehingga pagu menjadi sebesar Rp187.936.000
(anggaran terblokir semua).

24. 2355.EBD.953 meliputi:

a. Semula

Pagu Rp178.260.000;

Blokir Rp178.260.000;

b. Menjadi

Pagu Efektif Rp0;

Tambahan anggaran Rp0;

Blokir Rp178.260.000;

Sehingga pagu menjadi sebesar Rp178.260.000
(anggaran terblokir semua).

25. 2355.EBD.955 meliputi:

a. Semula

Pagu Rp76.910.000;

Blokir Rp59.660.000;

b. Menjadi

Pagu Efektif Rp17.250.000;

Tambahan anggaran Rp0;

Blokir Rp0;

Sehingga pagu menjadi sebesar Rp17.250.000.

26. 2355.EBD.961 meliputi:

a. Semula

Pagu Rp190.560.000;

Blokir Rp172.777.000;

b. Menjadi

Pagu Efektif Rp17.783.000;

Tambahan anggaran Rp0;

Blokir Rp172.777.000;

Sehingga pagu menjadi sebesar Rp190.560.000
(Sebagian besar anggaran terblokir).

27. 2355.EBD.974 meliputi:

a. Semula

Pagu Rp37.274.000;

Blokir Rp37.274.000;

b. Menjadi

Pagu Efektif Rp0;

Tambahan anggaran Rp0;

Blokir Rp37.274.000;

Sehingga pagu menjadi sebesar Rp37.274.000 (anggaran terblokir semua).

Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah:

- 1) Relaksasi anggaran pada belanja operasional meliputi penambahan anggaran belanja pegawai dan operasional serta pemeliharaan kantor dikarenakan pada tahun 2025 bulan Oktober terdapat penambahan pegawai (PPPK) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dan untuk pelaksanaan tugas serta fungsi pelayanan publik;
- 2) Relaksasi anggaran untuk kegiatan dalam rangka menambah penerimaan negara yang meliputi penambahan hari operasi Kapal pengawas dalam rangka pengawasan laut yang berdasarkan data hasil operasi terjadi tren peningkatan illegal fishing setiap akhir tahun.

18. Revisi Kedelapanbelas pada tanggal 3 Desember 2025 dengan tema Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan dilakukan merujuk pada Surat Usulan Revisi B.2180/PSDKPLan.1/RC.420/XII/2025 Tanggal 3 Desember 2025.

Rincian pada revisi kedelapanbelas berupa Pengeseran belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai antara lain:

1. 2350.QHD.001 Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam

- Penyediaan Logistik Kapal Pengawas KP HIU 12 pada jenis belanja barang sebesar Rp167.592.000; Penyediaan Dukungan Logistik pada jenis belanja barang sebesar Rp111.173.000; Penyediaan Logistik Awak Kapal sebesar Rp43.163.000; Medical Check Up Awak Kapal Pengawas pada jenis belanja barang sebesar Rp21.942.000; Operasional Speedboat Pengawas (Kapal Kelas V Napoelon) pada jenis belanja barang sebesar Rp2.600.000; Operasional Speedboat Pengawas (KP Kelas V Baramundi 01) pada jenis belanja barang sebesar Rp8.650.000; Operasional Speedboat Pengawas RIB pada jenis belanja barang sebesar Rp2.460.000 dilakukan pergeseran dalam satu komponen yang meliputi belanja barang diantaranya: BBM Genset Mesin Listrik Darat Kapal Pengawas (Rp15.000.000), Konsumsi Rapat Persiapan/Evaluasi Gelar Operasi (Rp9.720.000), Bahan Komputer (Rp10.800.000), Biaya langganan Listrik Darat Kapal Pengawas (Rp12.360.000), Paket Internet Starlink Kapal Pengawas (Rp7.000.000), Kebutuhan sehari-hari Kapal Pengawas (Rp1.200.000), Instalasi Alat Komunikasi/Starlink (Rp18.000.000), Perawatan Darurat Hiu 12 dan HMC 05 (Rp40.000.000), Pakaian Dinas KP dan Pegawai (Rp190.800.000), Perlengkapan menembak (Rp34.965.000)
- Penyediaan Logistik Kapal Pengawas pada jenis belanja modal sebesar Rp162.148.000 dilakukan

pergeseran dalam satu komponen meliputi Pengadaan Ac Split (Rp3.996.000), Alat Navigasi (Rp30.000.000), Laptop tambahan untuk satwas (Rp40.959.000), Mesin Kompresor (Rp10.000.000), Mesin Potong Kayu (Rp6.000.000), Perlengkapan KP HIU 12 dan KP HMC 05 (Rp666.000), Printer (Rp5.506.000), Scanner (Rp12.654.000), Scanner tambahan untuk satwas (Rp31.635.000), Pekerjaan Penataan Halaman Upacara Kantor Pangkalan PSDKP Lampulo (Rp. 30,830,000), Renovasi Pos Jaga Pangkalan PSDKP Lampulo (Rp8.000.000), Menara Penampungan Air Bersih RPS dan Mess Operator (Rp30.000.000).

- Operasional Speedboat 12 Meter (solar) pada jenis belanja barang sebesar Rp61.151.000; Operasional Speedboat 8 Meter pada jenis belanja barang sebesar Rp138.000; Operasional Speedboat Baramundi 01 pada jenis belanja barang sebesar Rp18.366.000; dan Monitoring Evaluasi Operasi Speedboat Pengawas pada jenis belanja barang sebesar Rp353.000 dilakukan pergeseran dalam satu komponen dan antar komponen satu RO meliputi Sepatu Loreng (Rp26.000.000), Seragam Loreng (Rp31.200.000), Kebutuhan pertukangan dermaga semipermanen Rp22.808.000.

2. 2350.RCG.001 Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat.

- Perawatan pencegahan kapal pengawas pada jenis belanja barang sebesar Rp12.000.000 dilakukan pergeseran dalam satu komponen meliputi belanja perawatan darurat kapal pengawas (Hiu 12 dan Hiu Macan 05) sebesar Rp12.000.000.
3. 2355.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal.
- Layanan BMN/Pelaksanaan Pengelolaan BMN pada jenis belanja barang sebesar Rp47.000 dilakukan pergeseran antar RO dalam satu KRO meliputi Layanan Umum/Layanan Umum Rumah Tangga berupa Spanduk sebesar Rp47.000.
4. 2355.EBA.994 Layanan Dukungan Manajemen Internal.
- Pembayaran Gaji PPPK pada jenis belanja pegawai sebesar Rp21.740.000; Tunjangan Kinerja PPPK sebesar Rp26.112.000 dilakukan pergeseran dalam satu Komponen meliputi Pembayaran Gaji sebesar Rp40.838.000, dan Tunjangan Kinerja PNS Rp7.014.000.
 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor pada jenis belanja barang meliputi Layanan Daya dan Jasa sebesar Rp15.590.000; Pemeliharaan Kantor (Gedung, Kendaraan, dll) sebesar Rp8.557.000 dilakukan pergeseran dalam satu komponen meliputi Pangkalan PSDKP Lampulo (JDT) sebesar Rp13.500.000, Pangkalan PSDKP Lampulo (KKSS) sebesar Rp11.405.000, Satwas SDKP Aceh Barat (KKSS) sebesar Rp700.000,

Satwas SDKP Bengkulu (KKSS) sebesar Rp1.710.000, Satwas SDKP Padang, Wilker (KKSS) sebesar Rp500.000, ATK/Bahan Komputer Satwas SDKP Padang sebesar Rp500.000, Pengiriman surat Satwas SDKP Aceh Barat sebesar Rp62.000, Pemeliharaan AC Split Pangkalan PSDKP Lampulo sebesar Rp1.120.000, Kendaraan Roda 2 Lampulo sebesar Rp1.320.000, Roda 2 Padang sebesar Rp3.218.000, Pemeliharaan Genser sebesar Rp1.598.000, Pemeliharaan Lampu Jalan Kantor/Penerangan Kantor sebesar Rp8.000.000, Honorarium Staf Pengelola/Staf PPK sebesar Rp2.352.000.

Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah:

- a) Pergeseran anggaran pada operasional Kapal dikarenakan detail belanja yang digeser telah dilakukan perhitungan untuk kebutuhan sampai akhir tahun yang berpotensi tersisa sehingga dilakukan pergeseran dengan menambah detail dalam rangka peningkatan kualitas realisasi anggaran serta mendukung pelaksanaan pengawasan patrol dan kantor lingku Pangkalan PSDKP Lampulo;
- b) Pergeseran anggaran dikarenakan untuk pemenuhan kebutuhan perawatan darurat kapal pengawas untuk memastikan kondisi kapal tetap dalam keadaan siap operasi;

- c) Pergeseran antar RO dalam satu KRO bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja dan realisasi Pangkalan PSDKP Lampulo;
- d) Pergeseran anggaran dalam komponen belanja pegawai bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan rencana realisasi belanja pegawai tidak mengalami pagu minus;
- e) Pergeseran anggaran pada operasional perkantoran bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan agar tetap berjalan dengan baik serta kebutuhan kantor dan pegawai tetap terjaga.

19. Revisi Kesembilanbelas tanggal 12 Desember 2025 dengan tema Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan dilakukan merujuk pada Surat Usulan Revisi B.2224/PSDKPLan.1/RC.420/XII/2025 Tanggal 12 Desember 2025.

Rincian pada revisi kesembilanbelas berupa Pengeseran belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai antara lain:

1. 2350.QHD.001 Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam
 - Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas (Kelas II,III, dan IV) dan RIB, dan Dukungan Anggaran Prasarana pada jenis belanja modal mengalami perubahan struk harga satuan diantaranya: AC Split semula Rp3.996.000 menjadi Rp7.992.000, Alat Navigasi semula Rp30.000.000 menjadi Rp16.500.000, Tambahan Detail Kulkas sebesar Rp2.442.000, Laptop semula Rp53.724.000 menjadi

Rp40.293.000, Tambahan Detail Meja Kerja ½ Biro sebesar Rp4.160.000, Penghapusan detail Mesin Kompresor Rp10.000.000, Penghapusan detail Mesin Potong Kayu Rp6.000.000, Scanner semula Rp31.635.000 menjadi Rp25.308.000, Penambahan detail Spring Bed/Tempat Tidur sebesar Rp5.000.000, Penambahan detail Starlink sebesar Rp23.660.000, dan Penambahan detail Vertical Blind sebesar Rp10.000.000.

2. 2355.EBA.994 Layanan Perkantoran

- Tunjangan Kinerja pada jenis belanja pegawai sebesar Rp12.456.000, dan Pembayaran Gaji PPPK sebesar Rp2.000 dilakukan pergeseran dalam satu komponen meliputi Pembayaran Gaji Pokok PNS sebesar Rp747.000, dan Tunjangan Kinerja PPPK sebesar Rp11.711.000.
- Layanan Daya dan Jasa pada jenis belanja barang sebesar Rp15.853.000, dan Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor sebesar Rp3.342.000 dilakukan pergeseran dalam satu komponen meliputi Kebutuhan sehari-hari perkantoran sebesar Rp2.849.000, dan Pemeliharaan Kantor (Gedung, Kendaraan, dll) sebesar Rp16.346.000.

Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah:

- a) Pergeseran anggaran atau penambahan detail belanja bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kantor dan kapal agar tetap dalam berjalan dengan baik serta percepatan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan; dan

- b) Pergeseran anggaran dalam komponen belanja pegawai bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan rencana realisasi belanja pegawai agar tidak mengalami pagu minus.

20. Revisi Keduapuluh pada tanggal 24 Desember 2025 dengan tema Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan dilakukan merujuk pada Surat Usulan Revisi B.2224/PSDKPLan.1/RC.420/XII/2025 Tanggal 24 Desember 2025.

Rincian pada revisi keduapuluh berupa Pengeseran belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai antara lain:

1. 2350.QHD.001 Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam
 - Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas/Penyediaan Logistik Kapal Pengawas HIU 12 pada jenis belanja barang sebesar Rp98.173.000, Penyediaan logistic awak kapal pengawas pada jenis belanja barang sebesar Rp102.747.000, Medical Check Up awak Kapal pengawas sebesar Rp2.000, dilakukan pergeseran anggaran pada satu komponen yang sama meliputi Penyediaan dukungan logistic kapal sebesar Rp2.087.000, Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas (Kelas II,III, dan IV) dan RIB, dan Dukungan Anggaran Prasarana sebesar Rp30.376.000, Operasional Speedboat Pengawas (Kapal Kelas V Napoleon) sebesar Rp36.815.000, Operasional Speedboat Pengawas (Kapal Kelas V Baramundi 01) sebesar Rp36.595.000,

Operasional Speedboat RIB sebesar Rp34.968.000, Pakaian Dinas KP dan Pegawai sebesar Rp60.081.000.

2. 2350.RCG.001 Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat

- Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas pada jenis belanja barang meliputi Perawatan Prediktif Kapal Pengawas sebesar Rp1.410.000, Perawatan Prediktif Speedboat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat sebesar Rp10.000.000 dilakukan pergeseran anggaran dalam komponen yang sama meliputi Perawatan Pencegahan Kapal Pengawas sebesar Rp1.410.000, dan Perawatan Darurat Speedboat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat sebesar Rp10.000.000.

3. 2352.BHD.002 Operasi Intelijen SDP

- Operasi Intelijen Pengawasan SDP pada jenis belanja barang meliputi Monev Pelaksanaan Operasi Intelijen Pengawasan SDP dengan mengurangi biaya laporan menjadi konsumsi rapat evaluasi sebesar Rp250.000.

3. 2355.EBA.994 Layanan Dukungan Manajemen Internal

- Gaji dan Tunjangan pada jenis belanja pegawai meliputi Pembayaran gaji uang makan pns sebesar Rp8.502.000, menjadi Uang Lembur dan Makan Lembur PNS sebesar Rp8.502.000; dan Pembayaran Gaji PPPK Uang Lembur dan Makan Lembur PPPK sebesar Rp5.472.000 menjadi Uang Makan PPPk sebesar Rp5.472.000.

- Operasional dan Pemeliharaan Kantor pada jenis belanja barang meliputi kebutuhan kantor sehari-hari sebesar Rp5.569.000, Layanan Daya dan Jasa sebesar Rp1.001.000 dilakukan pergeseran dalam komponen yang sama meliputi Pemeliharaan Kantor (Gedung, Kendaraan, dll) sebesar Rp6.124.000, dan Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor sebesar Rp446.000.

Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah:

- a) Pergeseran anggaran dikarenakan terdapat sisa BBM Kapal Pengawas yang tidak terserap sehingga dilakukan penambahan anggaran pada patroli speedboat dalam rangka pengawasan penertiban kapal perikanan di akhir tahun serta penambahan anggaran kebutuhan Pakaian Dinas KP dan Pegawai;
- b) Pergeseran anggaran bertujuan untuk pemenuhan tambahan pemeliharaan darurat Speedboat agar dalam kondisi siap operasi;
- c) Pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan rapat; dan
- d) Pergeseran anggaran pada belanja pegawai untukantisipasi pagu minus, dan meningkatkan kualitas realisasi serta pagu minus pada operasional perkantoran.

21. Revisi Keduapuluhsatu tanggal 26 Desember 2025 dengan tema Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan dilakukan merujuk pada Surat

Usulan Revisi B.2224/PSDKPLan.1/RC.420/XII/2025
Tanggal 26 Desember 2025.

Rincian pada revisi keduapuluhsatu berupa Pengeseran belanja barang dan belanja pegawai antara lain:

1. 2350.QHD.001 Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam
 - Pelaksanaan Operasi Kapal Pengawas pada jenis belanja barang meliputi Penyediaan Dukungan Logistik Lainnya sebesar Rp26.000, Penyediaan Logistik awak Kapal Pengawas sebesar Rp237.000, dan Pakaian Dinas KP dan Pegawai sebesar Rp506.000 dilakukan pergeseran dalam komponen yang sama meliputi Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas (Kelas II,III, dan IV) dan RIB, dan Dukungan anggaran Prasarana sebesar Rp769.000.
2. 2350.QDH.003 Operasi Speedboat Pengawas
 - Pelaksanaan Operasi Speedboat Pengawas pada jenis belanja barang meliputi Dukungan Operasional Awak Kapal dan Armada pertambahan anggaran kebutuhan Pertukangan Dermaga Semipermanen sebesar Rp22.200.000 yang bersumber dari penghapusan detail Sepatu loreng, dan seragam loreng sebesar Rp22.200.000.
3. 2355.EBA.994 Layanan Perkantoran
 - Pembayaran Gaji PPPK pada jenis belanja pegawai sebesar Rp4.680.000 dilakukan pergeseran dalam

komponen yang sama meliputi Pembayaran Gaji sebesar Rp4.680.000.

- Operasional dan Pemeliharaan Kantor pada jenis belanja barang meliputi Kebutuhan sehari-hari sebesar Rp101.000, dilakukan pergeseran dalam komponen yang sama meliputi pemeliharaan kantor (Gedung, Kendaraan, dll) sebesar Rp101.000.

Adapun justifikasi terkait revisi ini adalah:

- a) Pergeseran anggaran bertujuan untuk meningkatkan kualitas realisasi dan belanja.
- b) Pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan perbaikan dermaga agar memastikan armada speedboat dapat terjaga dengan baik; dan
- c) Pergeseran anggaran pada belanja pegawai untukantisipasi pagu minus, dan meningkatkan kualitas belanja dan realisasi anggaran.

*Realisasi
Pendapatan
Rp10.800.000*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025 Audited yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp10.800.000 dari pendapatan yang ditetapkan yaitu Rp0

Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin (425122) senilai Rp9.300.000 dan penerimaan kembali belanja modal TAYL (425913) senilai Rp1.500.000 dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Tahun 2025 Audited yang berakhir 31 Desember 2025*

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	Real Angg. (%)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425112)	-	9.300.000	
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (425913)	-	1.500.000	
Jumlah	-	10.800.000	-

Pendapatan Tahun 2025 Audited yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp10.800.000 dirincikan sebagai berikut:

- Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin (425122) adalah penjualan 1 (satu) unit speedboat Kakap berdasarkan salinan risalah lelang KPKNL Padang nomor 213/03.01/2025-01 tanggal 02 Oktober 2025.
- Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (425913) adalah kelebihan pembayaran atas item biaya listrik pada kontrak pembangunan kantor Satwas SDKP Padang. Pengembalian sudah dibayarkan ke kas negara dengan NTB: 903131084807 dan NTPN: AE69948VVNO4TK78 tanggal 23 Januari 2025.

*Perbandingan Pendapatan yang Berakhir 31 Desember
2025 Audited dan 2024 Audited*

URAIAN	31 Desember 2025 Audited	31 Desember 2024	NAIK/(TURUN) (%)
PNBP	10.800.000	64.823.246	(83,34)
Jumlah	10.800.000	64.823.246	(83,34)

Realisasi PNBP Tahun 2025 Audited yang berakhir pada 31 Desember 2025 menurun sebesar 83,34% jika dibandingkan

dengan Tahun 2024 *Audited*. Penurunan tersebut terjadinya karena hanya ada dua sumber PNBPN pada tahun 2025 sedangkan pada tahun 2024 berasal dari 3 sumber yaitu Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan (425121) senilai Rp18.580.146, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122) senilai Rp39.429.350, Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811) senilai Rp4.163.750 serta penerimaan Kembali belanja pegawai TAYL (425911) senilai Rp2.650.000. Selain itu pada tahun 2025, tidak adanya kegiatan pelepasan atau penjualan aset tetap seperti tanah, bangunan, maupun peralatan pada tahun berjalan. Hal ini berdampak langsung terhadap tidak adanya sumber penerimaan signifikan sebagaimana pada periode sebelumnya.

Realisasi Belanja **B.2 Belanja**

Negara

Rp30.098.768.255

.

Realisasi Belanja Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025 *Audited* yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp30.098.768.255** atau mencapai 91,09 persen dari anggaran belanja sebesar Rp33.043.832.000. Belanja terdiri atas belanja pegawai (51), belanja barang (52), dan belanja modal (53). Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 *Audited* yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Belanja Tahun 2025 Audited yang berakhir 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025 Audited		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	9.964.379.000.	9.963.618.662.	99.99
Belanja Barang	20.641.986.000.	17.697.694.111.	85.74
Belanja Modal	2.437.467.000.	2.437.455.482.	100.00
Total Belanja Kotor	33.043.832.000	30.098.768.255	91.09
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	33.043.832.000	30.098.768.255	91.09

Belanja pegawai telah terserap sebesar 99,99% dengan nilai serapan Rp9.963.618.662 dari Pagu Rp9.964,379,000. Belanja Barang terealisasi sebesar Rp17.697.694.111 atau sekitar 85,74% dari pagu anggaran Rp20.641.986.000. Selanjutnya, belanja modal telah terserap sebesar Rp2.437.455.482.000 atau 100% dari anggaran Rp2.437.467.000.

Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember Tahun 2025 Audited dan 2024 Audited

URAIAN	31 Desember 2025 Audited	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	9.963.618.662	9.008.334.550	10.60
Belanja Barang	17.697.694.111	17.015.252.166	4.01
Belanja Modal	2.437.455.482	4.997.699.402	(51.23)
Jumlah	30.098.768.255	31.021.286.118	(2.97)

Realisasi belanja Tahun 2025 Audited yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 2,97 persen jika dibandingkan dengan Tahun 2024 Audited. Penurunan signifikan pada belanja modal sebesar 51,23%, sedangkan belanja pegawai dan belanja barang mengalami peningkatan. Penurunan pada belanja modal disebabkan oleh efisiensi belanja modal gedung dan bangunan, baik belanja modal perencanaan dan pengawasan gedung maupun belanja

penambahan nilai gedung dan bangunan.

Rendahnya realisasi belanja modal periode ini juga dipengaruhi oleh Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 114/SJ/RC.420/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2025 dan penundaan sementara untuk proses perikatan/kontrak barang/jasa, serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Sedangkan meningkatnya belanja pegawai dipengaruhi oleh perubahan status beberapa tenaga kerja non ASN (PJLP) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 18 orang (11 golongan IX, 3 golongan VII, 4 golongan V) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 6/KEPMEN-KP/KP.320/IX/2025 tanggal 16 September 2025 yang menyebabkan bertambahnya belanja gaji pegawai tahun 2025 yang meliputi gaji pokok dan tunjangan, belanja lembur dan tunjangan khusus untuk ASN dan PPPK. Sedangkan, peningkatan belanja barang pada tahun 2025 dikarenakan penambahan 1 (satu) unit kapal pengawas yaitu KP. HMC 05 pada awal tahun 2025 yang menyebabkan meningkatnya anggaran untuk logistik dan operasional (BBM dan pelumas) Kapal pengawas.

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**

Rp9.963.618.662 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada

pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS dan PPPK sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan yang terdiri atas gaji dan tunjangan, tunjangan kinerja dan uang lembur pegawai kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian belanja pegawai Tahun 2025 Audited yang berakhir pada 31 Desember 2025 disajikan pada tabel dibawah ini:

*Rincian Belanja Pegawai Tahun 2025 Audited yang berakhir
31 Desember 2025*

URAIAN	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS(5111)	3.544.651.000	3.544.344.197	99.99
Belanja Gaji Pokok PNS	2.607.966.000	2.607.964.900	100.00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	36.000	35.403	98.34
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	198.376.000	198.374.600	100.00
Belanja Tunj. Anak PNS	71.640.000	71.638.652	100.00
Belanja Tunj. Struktural PNS	26.280.000	26.280.000	100.00
Belanja Tunj. Fungsional PNS	70.610.000	70.610.000	100.00
Belanja Tunj. PPh PNS	13.265.000	13.264.013	99.99
Belanja Tunj. Beras PNS	163.887.000	163.886.460	100.00
Belanja Uang Makan PNS	306.561.000	306.328.000	99.92
Belanja Tunjangan Umum PNS	86.030.000	86.030.000	100.00
Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	-67.831	-
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK (5116)	1.329.164.000	1.328.805.809	99.97
Belanja Gaji Pokok PPPK	974.574.000	974.572.800	100.00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	20.000	17.667	88.34
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	73.904.000	73.903.880	100.00
Belanja Tunjangan Anak PPPK	23.978.000	23.976.662	99.99
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	70.320.000	70.320.000	100.00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	71.696.000	71.695.800	100.00
Belanja Uang Makan PPPK	103.272.000	102.919.000	99.66
Belanja Tunjangan Umum PPPK	11.400.000	11.400.000	100.00
Belanja Lembur (5122)	176.685.000	176.594.000	99.95
Belanja Lembur PNS	121.965.000	121.912.000	99.96
Belanja Uang Lembur PPPK	54.720.000	54.682.000	99.93
Belanja Tunj. Khusus (5124)	4.913.879.000	4.913.874.656	100.00
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	3.629.616.000	3.629.613.476	100.00
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1.284.263.000	1.284.261.180	100.00
Jumlah Belanja	9.964.379.000	9.963.618.662	99.99

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 Audited yang berakhir pada 31 Desember 2025 mencapai 99,99 % dari anggaran sebesar **Rp9.964.379.000**. Belanja barang terdiri

atas belanja operasional, non operasional, persediaan, pemeliharaan, jasa dan perjalanan dalam negeri.

Perbandingan Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 Audited dan 2024 Audited

URAIAN	31 Desember 2025 Audited	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (5111)	3.544.344.197	3.357.669.063	5.56
Belanja Gaji Pokok PNS	2.607.964.900	2.523.850.500	3.33
Belanja Pembulatan Gaji PNS	35.403	37.839	(6.44)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	198.374.600	186.332.040	6.46
Belanja Tunj. Anak PNS	71.638.652	66.337.572	7.99
Belanja Tunj. Struktural PNS	26.280.000	32.760.000	(19.78)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	70.610.000	63.990.000	10.35
Belanja Tunj. PPh PNS	13.264.013	12.705.076	4.40
Belanja Tunj. Beras PNS	163.886.460	156.427.200	4.77
Belanja Uang Makan PNS	306.328.000	233.910.000	30.96
Belanja Tunjangan Umum PNS	86.030.000	82.615.000	4.13
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	-119	-1.164	(90)
Pengembalian Belanja Tunjangan PPh PNS	-67.712	0	#DIV/o!
Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS		-1.295.000	(100.00)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK (5116)	1.328.805.809	1.058.917.612	25.49
Belanja Gaji Pokok PPPK	974.572.800	799.624.400	21.88
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	17.667	17.712	(0.25)
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	73.903.880	57.132.050	29.36
Belanja Tunjangan Anak PPPK	23.976.662	20.346.916	17.84
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	70.320.000	69.600.000	1.03
Belanja Tunjangan Beras PPPK	71.695.800	59.311.980	20.88
Belanja Uang Makan PPPK	102.919.000	52.885.000	94.61
Belanja Tunjangan Umum PPPK	11.400.000	0	#DIV/o!
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK		-446	(100.00)
Belanja Lembur (5122)	176.594.000	219.201.000	(19.44)
Belanja Lembur PNS	121.912.000	180.871.000	(32.60)
Belanja Uang Lembur PPPK	54.682.000	38.330.000	42.66
Belanja Tunj. Khusus (5124)	4.913.874.656	4.372.546.875	12.38
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	3.629.613.476	3.314.981.171	9.49
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1.284.261.180	1.057.603.616	21.43
Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	-37.912	(100.00)
Jumlah Belanja	9.963.618.662	9.008.334.550	10.60

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 Audited yang berakhir pada 31 Desember 2025 meningkat signifikan sebesar 10,60 persen yang diimbangi naiknya pagu anggaran dari tahun 2024 Audited disebabkan pengangkatan sebanyak 18 orang menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) meliputi 11 golongan IX, 3 golongan VII, 4 golongan V

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 6/KEPMEN-KP/KP.320/IX/2025 tanggal 16 September 2025.

Belanja Barang **B.4 Belanja Barang**

Rp17.697.694.111 Belanja barang adalah pengeluaran yang bersifat rutin dan habis pakai dalam satu periode anggaran, seperti pembelian perlengkapan kantor, bahan baku, dan jasa operasional menjalankan kegiatan sehari-hari. Karakteristik utamanya bersifat konsumtif, dicatat sebagai beban langsung di laporan laba rugi, tidak dikapitalisasi (tidak menambah nilai aset jangka panjang), dan memiliki frekuensi tinggi. Rincian Belanja Barang Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut:

*Rincian Belanja Barang Tahun 2025 Audited yang berakhir
31 Desember 2025*

No	URAIAN	Anggaran	Realisasi	%Realisasi
1	Belanja Barang Operasional (5211)	1.980.039.000	1.979.847.350	99.99
	Belanja Keperluan Perkantoran	1.246.353.000	1.246.175.820	99.99
	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	185.627.000	185.615.830	99.99
	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.414.000	5.412.100	99.96
	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	109.710.000	109.710.000	100.00
	Belanja Barang Operasional Lainnya	432.935.000	432.933.600	100.00
2	Belanja Barang Non Operasional (5212)	13.769.174.000	11.285.763.067	81.96
	Belanja Bahan	12.856.658.000	10.445.768.700	81.25
	Belanja Honor Output Kegiatan	28.550.000	27.100.000	94.92
	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	883.966.000	812.894.367	91.96
3	Belanja Barang Persediaan (5218)	53.724.000	53.536.600	99.65
	Belanja Barang Persediaan Konsumsi	53.724.000	53.536.600	99.65
4	Belanja Jasa (5221)	1.202.875.000	1.192.254.405	99.12
	Belanja Langganan Listrik	285.538.000	285.536.109	100.00
	Belanja Langganan Telepon	152.845.000	152.767.826	99.95
	Belanja Langganan Air	11.206.000	11.204.808	99.99
	Belanja Sewa	43.440.000	43.435.000	99.99
	Belanja Jasa Profesi	7.200.000	0	-
	Belanja Jasa Lainnya	702.646.000	699.310.662	99.53
5	Belanja Pemeliharaan (5231)	2.189.600.000	2.189.204.569	99.98
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	251.697.000	251.696.600	100.00
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.254.324.000	1.253.983.382	99.97
	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan	646.090.000	646.036.087	99.99
	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	8.000.000	8.000.000	100.00
	Belanja Pemeliharaan Jaringan	29.489.000	29.488.500	100.00
6	Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241)	1.446.574.000	997.088.120	68.93
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.240.764.000	952.355.237	76.76
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.197.000	13.389.000	55.33
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19.500.000	0	-
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	162.113.000	31.343.883	19.33
	Jumlah Belanja	20.641.986.000	17.697.694.111	85.74

Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 Audited yang berakhir pada 31 Desember 2025 senilai **Rp17.697.694.111** atau mencapai 85,74% dari anggaran sebesar Rp20.641.986.000. Belanja barang terdiri atas belanja operasional, non operasional, persediaan, pemeliharaan, jasa dan perjalanan dalam negeri.

*Perbandingan Belanja Barang untuk periode yang berakhir
31 Desember 2025 Audited dan 2024 Audited*

URAIAN	31 Desember 2025 <i>Audited</i>	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional (5211)	1.979.847.350	2.429.890.558	(18,52)
Belanja Barang Non Operasional (5212)	11.285.763.067	5.828.874.420	93,62
Belanja Barang Persediaan (5218)	53.536.600	178.423.337	(69,99)
Belanja Jasa (5221)	1.192.254.405	1.096.670.477	8,72
Belanja Pemeliharaan (5231)	2.189.204.569	3.162.527.668	(30,78)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241)	997.088.120	4.307.460.186	(76,85)
Belanja Perjalanan Luar Negeri (5242)	0	11.405.520	
Jumlah Belanja	17.697.694.111	17.003.846.646	4,08

Berdasarkan data pada tabel, realisasi belanja barang Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025 Audited yang berakhir pada 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp17.697.694.111, mengalami kenaikan 4,08% dibandingkan Tahun 2024 Audited.

Belanja Barang Operasional (akun 5211) mengalami penurunan sebesar 18,52%, dari Rp2.429.890.558 pada tahun 2024 Audited menjadi Rp1.979.847.350 pada Tahun 2025 Audited yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Kenaikan terbesar terjadi pada Belanja Barang Non Operasional (93,62%) yang meliputi belanja bahan (BBM, pelumas, dukungan operasional kapal pengawas/ kapal kelas V/speedboat, logistik, dukungan operasi Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan/Perikanan dan penanganan pelanggaran), belanja barang non operasional lainnya (uang makan, uang jaga sandar, biaya delegasi kapal pengawas HIU 12 dan Hiu Macan 05, speedboat Baramundi 01, Napoleon 036, Napoleon 045, Rigid Inflatable Boat dan belanja pelaksanaan operasi intelijen pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan) dan belanja honor ouput kegiatan. Pada awal tahun 2025 Pangkalan PSDKP Lampulo

mendapat tambahan 1 (satu) unit kapal pengawas yaitu KP. Hiu Macan 05 dari Pangkalan PSDKP Batam berdasarkan BAST nomor B.7/PSDKPlan2/PL.510/1/2025 tanggal 1 Januari 2025. Dengan adanya 2 (dua) unit kapal pengawas, yaitu KP. Hiu 12 dan KP. HMC 05 membutuhkan tambahan anggaran operasional dan dukungan logistik awak kapal.

Belanja Barang Persediaan (akun 5218) tercatat menurun sebesar 6,99%, dari Rp798.423.337 pada tahun 2024 *Audited* menjadi Rp553.536.600 pada Tahun 2025 *Audited* yang berakhir pada 31 Desember 2025. Penurunan ini menunjukkan pengelolaan persediaan yang lebih efisien, dengan memanfaatkan sisa persediaan tahun sebelumnya serta penyesuaian volume pengadaan sesuai kebutuhan riil kegiatan.

Belanja Jasa (akun 5221) mengalami kenaikan sebesar 8,72%, dari Rp1.096.670.477 pada tahun 2024 *Audited* menjadi Rp1.192.254.405 pada Tahun 2025 *Audited* yang berakhir pada 31 Desember 2025 disebabkan meningkatnya realisasi belanja listrik, air, telepon, sewa dan jasa lainnya lingkup pangkalan PSDKP Lampulo guna menunjang kegiatan administrasi dan pengawasan selama tahun 2025.

Belanja Pemeliharaan (akun 5231) justru mengalami penurunan sebesar 30,78%, dari Rp3.162.527.668 pada tahun 2024 *Audited* menjadi Rp2.189.204.569 pada Tahun 2025 *Audited* yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Demikian juga Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri (akun 5241) mengalami penurunan sebesar 76,85%, dari Rp4.307.460.186 pada tahun 2024 *Audited* menjadi Rp997.088.120 Tahun 2025 *Audited* yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Penurunan tajam ini merupakan dampak langsung dari kebijakan efisiensi anggaran, dengan pembatasan perjalanan dinas dan optimalisasi koordinasi melalui sarana non-tatap muka. Rincian belanja barang Non Operasional Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Rincian Belanja Non Operasional Lainnya Tahun 2025
Audited yang berakhir 31 Desember 2025

KODE	U R A I A N	NILAI (Rp)
5212	Belanja Barang Non Operasional	11.285.763.067
	Logistik Kapal Pengawas KP Hiu 12	5.758.465.000
	Penyediaan Dukungan Logistik Lainnya	18.074.000
	Penyediaan Logistik Awak Kapal Pengawas	483.360.200
	BBM dan Pelumas KP (PNBP)	3.627.844.000
	Dukungan Penyelesaian TPKP	2.540.000
	Operasional Speedboat Pengawas (Kapal Kelas V Napoleon)	129.250.000
	Operasional Speedboat Pengawas (KP Kelas V Baramundi 01)	76.875.000
	Operasional Speedboat Pengawas (RIB)	81.750.000
	Evaluasi dan Penyegaran Menembak	34.965.000
	Operasional Speed Boat 12 Meter (Solar)	71.566.500
	Operasional Speed Boat 8 Meter	42.084.000
	Operasional Speedboat Baramundi 01 (8 Meter)	42.313.500
	Monitoring dan Evaluasi Operasi Speedboat Pengawas	2.800.000
	Perawatan Pencegahan Kapal Pengawas	17.279.000
	Persiapan Pengenaan Sanksi Administratif	750.000
	Ekspose Pengenaan Sanksi Administratif	2.190.000
	Pelaksanaan Perkara Sanksi Administratif	1.560.000
	Ekspose TPKP	750.000
	Pemberkasan Perkara TPKP	5.880.000
	Penjagaan dan Logistik Penanganan Awak Kapal TPKP	5.830.000
	Pelaksanaan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	9.600.000
	Monev dan pelaporan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	2.000.000
	Perencanaan/persiapan pemeriksaan kepatuhan unit usaha sumberdaya kelautan	450.000
	Layanan umum rumah tangga	4.550.500
	Kebutuhan sehari-hari perkantoran	23.042.000
	Jumlah Belanja Bahan (521211)	10.445.768.700
	Penjagaan dan Perawatan Barang Bukti TPKP	9.000.000
	Pemberkasan Perkara TPKP	5.000.000
	Penjagaan dan Logistik Penanganan Awak Kapal TPKP	1.900.000
	Dukungan Penyelesaian TPKP	11.200.000
	Jumlah Belanja Honor Output Kegiatan (521213)	27.100.000
	Biaya Delegasi Kp. Hiu 12 dan HMC 05	56.915.000
	Uang Jaga Sandar KP. Hiu 12 dan HMC 05	179.941.700
	Biaya Delegasi dan Jaga Sandar Kp. Hiu 12 dan HMC 05 (PNBP)	332.488.000
	Uang Makan dan Biaya Delegasi Speedboat Kelas V (NAPOLEON)	50.764.000
	Uang Makan Biaya Delegasi Speedboat Baramundi 01 (8 Meter)	23.247.000
	Uang Makan Biaya Delegasi RIB (8 Meter)	22.938.000
	Uang Makan dan Biaya Delegasi Operasional Speed Boat 12 Meter	24.949.000
	Uang Makan dan Biaya Delegasi Operasional Speed Boat 8 Meter	16.480.000
	Uang Makan Biaya Delegasi Speedboat Baramundi 01	14.061.000
	Kebutuhan Pertukangan Dermaga Semipermanan	44.999.000
	Pelaksanaan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan	11.822.000
	Pelaksanaan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	17.913.561
	Monev Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	2.500.000
	Operasional Perkantoran	13.876.106
	Jumlah Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219)	812.894.367

Belanja Modal
Rp2.437.455.482

B.5 Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberikan manfaat ekonomi lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Belanja ini dicatat sebagai aset di neraca, bukan sebagai beban pada tahun pengeluaran, dan manfaatnya disusutkan seiring waktu. Rincian belanja modal Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025 Audited yang berakhir pada 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut:

Realisasi Belanja Tahun 2025 Audited yang berakhir pada 31 Desember 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%REALISASI
Belanja Modal Tanah	0	0	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.146.585.000	2.146.573.482	100.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.830.000	67.830.000	100.00
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	223.052.000	223.052.000	100.00
Jumlah Belanja Kotor	2.437.467.000	2.437.455.482	100.00
Pengembalian	0	0	-
Jumlah Belanja	2.437.467.000	2.437.455.482	100.00

Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 Audited yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar **Rp2.437.455.482** atau sekitar 100% dari anggaran sebesar Rp2.437.467.000. Realisasi ini sepenuhnya berasal dari belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal jaringan.

Perbandingan Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 Audited dan 2024 Audited

URAIAN	31 Desember 2025 <i>Audited</i>	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.146.573.482	913.171.000	135.07
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.830.000	3.662.580.000	(98)
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	223.052.000	422.213.000	-
Belanja Modal Lainnya	0	0	-
Jumlah Belanja	2.437.455.482	4.997.964.000	(51.23)

Berdasarkan tabel realisasi belanja modal, secara agregat belanja modal pada Tahun *2025 Audited* yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan signifikan sebesar 51,23%, dari Rp4.997.964.000 pada tahun 2024 *Audited* menjadi Rp2.437.467.000 pada tahun 2025 *Audited*. Penurunan ini mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan belanja modal yang lebih selektif dan terfokus, sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran.

Secara keseluruhan, penurunan total belanja modal Tahun *2025 Audited* yang berakhir pada 31 Desember 2025 dibandingkan Tahun 2024 *Audited* terutama disebabkan oleh berkurangnya belanja modal gedung dan bangunan. Pada Tahun 2024 *Audited* belanja modal gedung dan bangunan menjadi komponen belanja terbesar. Namun demikian, kenaikan signifikan pada belanja modal peralatan dan mesin menunjukkan adanya perubahan fokus kebijakan belanja, dari pembangunan fisik jangka panjang menuju penguatan kapasitas operasional dan dukungan kinerja secara langsung.

Belanja Modal Tanah dan Belanja Modal Lainnya tidak direalisasikan baik pada Tahun 2024 *Audited* maupun Tahun 2025 *Audited* karena tidak terdapat kebutuhan

maupun program pengadaan tanah yang menjadi prioritas Pangkalan PSDKP Lampulo.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 135,07%, dari Rp913.171.000 pada Tahun 2024 *Audited* menjadi Rp2.146.585.000 pada Tahun 2025 *Audited* yang berakhir pada 31 Desember 2025. Sebaliknya, Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami penurunan tajam sebesar 98%, dari Rp3.662.580.000 pada Tahun 2024 *Audited* menjadi Rp67.830.000 pada Tahun 2025 *Audited* yang berakhir pada 31 Desember 2025. Demikian juga Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan juga mengalami penurunan sebesar 47,12%, dari Rp422.213.000 pada Tahun 2024 *Audited* menjadi Rp223.052.000 pada Tahun 2025 *Audited* yang berakhir pada 31 Desember 2025. Penurunan drastis ini dampak dari regulasi terkait kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025.

Kebijakan rasionalisasi anggaran dan efisiensi anggaran mengharuskan pemotongan anggaran yang sangat signifikan seperti jasa konsultan sebesar 45,7% dan infrastruktur mencapai 34,3%.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025 *Audited* yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 *Audited* adalah Rp0 dan Rp0. Belanja Modal Tanah tidak direalisasikan baik pada Tahun 2024 *Audited* maupun Tahun 2025 *Audited* yang berakhir pada 31 Desember 2025 karena tidak terdapat kebutuhan maupun program pengadaan

tanah yang menjadi prioritas Pangkalan PSDKP Lampulo.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 *Audited* yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 *Audited* adalah sebesar Rp2.146.573.482 dan Rp913.117.000. Belanja peralatan dan mesin tersebut telah terealisasi sebesar 100% dari pagu anggaran Rp2.146.585.000.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 Audited dan 2024 Audited

URAIAN	31 Desember 2025 <i>Audited</i>	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan Mesin	2.146.585.000	913.171.000	135.07
Penambahan Nilai Aslin			
Jumlah Belanja Kotor	2.146.585.000	913.171.000	135.07
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	2.146.585.000	913.171.000	135.07

Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 135,07%, dari Rp913.171.000 pada Tahun 2024 *Audited* menjadi Rp2.146.585.000 pada Tahun 2025 *Audited* yang berakhir pada 31 Desember 2025. Kenaikan ini mengindikasikan adanya pergeseran prioritas belanja modal ke arah penguatan sarana dan prasarana operasional yang bersifat langsung mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Rincian Belanja peralatan dan mesin pada Tahun 2025 *Audited* yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Rincian Belanja Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 Audited

No.	Uraian	Volume	Satuan	Nilai
1.	Sepeda Motor	2	Unit	55.990.000
2.	Speedboat/ Motor Tempel	2	Unit	1.703.507.000
3.	Alat Scanner	4	Buah	25.308.000
4.	Lemari Besi/ Metal	1	Buah	2.791.650
5.	Alat Kantor Lainnya	15	Unit	102.097.800
6.	Meja Kerja Besi/ Metal	1	Buah	1.561.092
7.	Meja Kerja Kayu	2	Buah	4.999.440
8.	Kasur/ Springbed	1	Buah	5.494.500
9.	AC Split	10	Unit	64.279.000
10.	Vertikal Blind	1	Buah	10.000.000
11.	Microphone wireless MIC	1	Buah	1.830.000
12.	Mixer Sound System	1	Unit	1.930.000
13.	Alat Komunika Telephon Lainnya	6	Unit	76.368.000
14.	Tablet PC	1	Buah	8.499.000
15.	Laptop	6	Unit	81.918.000
		54		2.146.573.482

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 Audited yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 Audited masing-masing sebesar Rp67.830.000 dan Rp3.662.521.841. Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut telah terealisasi sebesar 100% dari pagu anggaran Rp67.830.000.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 Audited dan 2024 Audited

URAIAN	31 Desember 2025 Audited	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.830.000	3.227.568.541	(99)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	311.253.300	(100)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	37.000.000	123.700.000	-
Jumlah Belanja Kotor	67.830.000	3.662.521.841	(98)
Pengembalian Belanja Modal			-
Jumlah Belanja	67.830.000	3.662.521.841	(100)

Berdasarkan tabel realisasi belanja modal gedung dan bangunan, total belanja modal pada Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan sangat signifikan sebesar 100% dibandingkan Tahun 2024 *Audited*. Belanja modal pada Tahun 2024 *Audited* senilai Rp3.662.521.841 menjadi Rp67.830.000 pada Tahun 2025 *Audited*.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 hanya terealisasi sebesar Rp30.830.000, mengalami penurunan sebesar 99% dibandingkan realisasi Tahun 2024 *Audited* yang mencapai Rp3.227.568.541. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan tidak terealisasi pada Tahun 2025 *Audited* yang berakhir pada 31 Desember 2025, sementara pada Tahun 2024 *Audited* tercatat sebesar Rp311.253.300.

Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp37.000.000, namun tetap mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024 *Audited* yang mencapai Rp123.700.000. Penurunan drastis belanja modal Tahun 2025 *Audited* dibandingkan Tahun 2024 *Audited* terutama disebabkan penerapan kebijakan efisiensi anggaran.

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 *Audited* masing-masing sebesar Rp193.052.000 dan Rp422.178.998.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jaringan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 Audited dan 2024 Audited

URAIAN	31 Desember 2025 <i>Audited</i>	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	193.052.000	422.178.998	-
Jumlah Belanja Kotor	193.052.000	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	193.052.000	422.178.998	-

Belanja modal jaringan Tahun 2025 Audited yang berakhir 31 Desember 2025 adalah Pembangunan Jaringan Listrik Darat untuk Kapal Pengawas di Satwas SDKP Padang.

Belanja Penambahan Nilai Jaringan adalah Pembangunan Jaringan Listrik (Jaringan Listrik darat Untuk Kapal Pengawas) berkapasitas 66 kVA dengan nilai perolehan Rp193.052.000 oleh CV. PT. Hidayat Sumber Energi berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 0443/PSDKPLan. 1/PL.421/VIII/2025 Tanggal 21 Agustus 2025 dan Berita Acara Serah Terima Nomor 0452/PSDKPLan.1/PL.430/VIII/2025 Tanggal 26 Agustus 2025.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar **Rp0** yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan. Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2025
Audited yang berakhir pada 31 Desember 2025*

Keterangan	31 Desember 2025
A. Kas di Bendahara Pengeluaran	-
¹ - Saldo UP	-
¹ - Kuitansi UP yang belum di-SPJkan	-
B. Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	-
¹ - Saldo TUP	-
¹ - Kuitansi TUP yang belum di-SPJkan	-
Jumlah	-

Pada akhir Tahun 2025 *Audited* terdapat pengembalian belanja UP dan TUP Pangkalan PSDKP Lampulo sebagai berikut:

- Pengembalian sisa UP senilai Rp143.851 disetor ke kas negara sesuai dengan NTB: FT25364JB1SF dan NTPN: 1D07C2CPTEMKMGJC tanggal 30 Desember 2025.
- Pengembalian sisa TUP senilai Rp182.301.185 disetor ke kas negara sesuai dengan NTB: FT25365NGDTL, dan NTPN: E373D522CUEDOP87 tanggal 31 Desember 2025.

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun *2025 Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan tahun *2024 Audited* sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2025 Audited yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 Audited

Keterangan	31 Desember 2025 <i>Audited</i>	31 Desember 2024
Uang Tunai	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Tahun *2025 Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan tahun *2024 Audited* masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Tahun 2025 Audited yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 Audited

Keterangan	31 Desember 2025 Audited	31 Desember 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

Belanja Bayar Dimuka Rp0

C.4 Belanja Dibayar di Muka

Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Saldo Belanja Dibayar di Muka Tahun 2025 Audited yang berakhir 31 Desember 2025 dan tahun 2024 Audited masing-masing adalah sebesar Rp2.500.000 dan Rp6.666.667.

Rincian Belanja Bayar dimuka Tahun 2025 Audited yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 Audited

Keterangan	31 Desember 2025 Audited	31 Desember 2024
Belanja Bayar Dimuka (Prepaid)	2.500.000	6.666.667
Jumlah	2.500.000	6.666.667

Saldo belanja bayar dimuka awal tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Sewa	Uraian		
		Nilai Kontrak	Kontrak Berjalan	Sisa Kontrak
1	Sewa Gedung Pelayanan Satwas Aceh Barat sesuai Kontrak Nomor 0067/PSDKPLan.1/PL.421/II/2025 Masa Kontrak 1 tahun mulai Tanggal 11 Februari 2025 s.d 10 Februari 2026.	15.000.000	13.750.000	1.250.000
2	Sewa Gedung Pelayanan Aceh Selatan (Sawang) Wilker Tapaktuan Satwas SDKP Simeulue sesuai Kontrak Nomor: B.187/PSDKPLan.1/TU.450/I/2025 masa kontrak 1 tahun mulai 01 Februari 2025 s.d 31 Januari 2026	15.000.000	13.750.000	1.250.000
Jumlah		30.000.000	27.500.000	2.500.000

Nilai belanja bayar dimuka tersebut telah dilakukan memo penyesuaian jurnal khusus karena masa kontrak belum berakhir, sehingga nilai belanja bayar dimuka tahun 2025 *Audited* sebesar Rp2.500.000.

*Uang Muka
Belanja
(Prepayment) Rp0*

C.5 Uang Muka Belanja (Prepayment)

Uang Muka Belanja (*prepayment*) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Saldo Uang Muka Belanja (*prepayment*) Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan tahun 2024 *Audited* masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Uang Muka Belanja (*prepayment*) adalah sebagai berikut:

*Rincian Uang Muka Belanja (Prepayment) Tahun 2025
Audited yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
Audited*

Keterangan	31 Desember 2025 <i>Audited</i>	31 Desember 2024
Uang Muka Belanja Prepayment	-	-
Jumlah	-	-

*Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima Rp0*

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan tahun 2024 *Audited* masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Piutang PNB
Rp0*

C.7 Piutang PNB

Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan

namun belum diselesaikan pembayarannya. Saldo Piutang PNPB Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan tahun 2024 *Audited* masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0.

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih - Piutang
Bukan Pajak
Rp0.*

C.8 Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang tak tertagih telah dilakukan koreksi. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan tahun 2024 *Audited* masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0.

*Bagian Lancar
TPA
Rp0*

C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan tahun 2024 *Audited* masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Bagian Lancar
Tagihan
Tuntutan*

C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Perbendaharaan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar
/Tuntutan Ganti tagihan TP/TGR.
Rugi (TP/TGR) Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Tahun
Rp0 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan tahun
 2024 *Audited* adalah sebesar **Rp0**. dan **Rp0**.

Persediaan

Rp472.047.590

C.13 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar **Rp472.047.590**. Rincian Persediaan Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 *Audited* sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahun 2025 Audited yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 Audited

Jenis	31 Desember 2025 Audited	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Barang Konsumsi	18.333.610	10.885.610	68.42
Bahan Baku			
Suku Cadang	453.713.980	203.010.100	123.49
Barang Persediaan untuk strategis berjaga-jaga	-	-	-
Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	472.047.590	213.895.710	120.69

Berdasarkan data tabel di atas, total belanja persediaan Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 mencapai Rp472.047.590, meningkat sebesar 120,169% dibandingkan dengan Tahun 2024 *Audited* sebesar **Rp213.895.710**. Kenaikan terbesar terjadi pada suku cadang, yang meningkat signifikan sebesar 123,49%, dari Rp203.010.100 menjadi Rp453.713.590. Sementara itu,

Barang konsumsi juga mengalami peningkatan sebesar 68,42%, dari Rp10.885.610 pada Tahun 2024 *Audited* menjadi Rp18.333.610 pada Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025. Tidak terdapat realisasi untuk kategori Bahan Baku, Barang Persediaan Strategis, maupun Persediaan Lainnya pada kedua tahun anggaran tersebut.

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik sesuai dengan Berita Acara Hasil Inventarisasi Persediaan Pangkalan PSDKP Lampulo Nomor B.2585/PSDKPLan.1/PL.450/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

Rincian item Barang Konsumsi dan Suku Cadang disajikan pada tabel berikut:

KODE	U R A I A N	NILAI (Rp)
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	191.500
1010301003	Penjepit Kertas	230.000
1010301004	Penghapus/ Korektor	36.000
1010301005	Buku Tulis	28.000
1010301006	Ordner Dan Map	169.500
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	98.000
1010301010	Alat Perekat	234.500
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	709.910
1010302001	Kertas HVS	2.325.000
1010302004	Amplop	97.000
1010304004	Tinta/Toner Printer	6.644.000
1010306009	Accu	7.570.200
Jumlah per Akun		18.333.610
117114	Suku Cadang	
1010201003	Suku Cadang Alat Angkutan Apung Bermotor	421.690.036
1010202002	Suku Cadang Alat Besar Apung	32.023.944
Jumlah per Akun		453.713.980

Berdasarkan data anggaran Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025, total realisasi barang persediaan adalah sebesar Rp472.047.590, yang terdiri dari Barang Konsumsi senilai Rp18.333.610 dan Suku Cadang senilai Rp453.2713.980. Pada komponen barang konsumsi, pengadaan difokuskan pada kebutuhan kantor seperti alat

tulis, tinta printer, kertas HVS, dan baterai yang penting untuk mendukung operasional administrasi harian. Sementara itu, alokasi terbesar merupakan suku cadang Kapal Pengawas HIU 12 dan HIU MACAN 05.

Mutasi Persediaan disajikan pada tabel berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Persediaan 01 Januari 2025	213.895.710
Mutasi Tambah	
Pembelian Persediaan Barang Konsumsi	53.771.600
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	646.036.087
Transfer masuk suku cadang	550.027.664
Pendapatan Perolehan Lainnya	217.005.800
Total Mutasi Tambah	1.466.841.151
Mutasi Kurang	
Beban Persediaan Barang Konsumsi	97.583.527
Beban Persediaan Bahan pemeliharaan	8.991.000
Beban Persediaan Suku Cadang	885.108.994
Beban Pelepasan Aset	217.005.800
Total Mutasi kurang	1.208.689.321
Saldo Akhir 31 Desember 2025	472.047.540

- Rincian item Pembelian Persediaan Barang Konsumsi dan Pembelian Suku Cadang disajikan pada tabel dibawah ini:

KODE	U R A I A N	NILAI
117111	Barang Konsumsi	53.771.600
1010301001	Alat Tulis	1.282.700
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	50.000
1010301003	Penjepit Kertas	466.300
1010301004	Penghapus/Korektor	51.000
1010301005	Buku Tulis	125.000
1010301006	Ordner Dan Map	443.000
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	234.000
1010301010	Alat Perekat	384.500
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	4.418.600
1010302001	Kertas HVS	12.592.500
1010302002	Berbagai Kertas	19.500
1010302003	Kertas Cover	40.000
1010302004	Amplop	97.000
1010304004	Tinta/Toner Printer	11.513.000
1010304006	USB/Flash Disk	2.273.500
1010304009	Harddisk Internal	2.700.000
1010304010	Mouse	725.000
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	13.458.000
1010306010	Batu Baterai	933.000
1010309003	Stempel	180.000
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor	135.000
1010201003	Suku Cadang Alat Angkutan Apung	1.650.000
1010305003	Bahan untuk Pemeliharaan	8.991.000
1010201003	Suku Cadang Alat Angkutan Apung	8.991.000
117114	Suku Cadang	584.135.160
1010201003	Suku Cadang Alat Angkutan Apung	574.641.160
1010299999	Suku Cadang Lainnya	9.494.000
1010306001	Kabel Listrik	42.142.500
1010306002	Lampu Listrik	1.661.000
1010306003	Stop Kontak	80.000
1010306004	Saklar	15.000
1010306999	Alat Listrik Lainnya	6.041.300
1010307001	Bahan Baku Pakaian	1.960.000
1010307004	Penutup Tangan	90.000
1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan	920.127
TOTAL		699.807.687

- Belanja persediaan barang konsumsi menurut LRA sebesar Rp53.536.600 namun menurut pencatatan dalam Daftar Rincian Persediaan barang Konsumsi senilai Rp53.771.600. Hal ini terjadi karena transaksi belanja barang persediaan senilai Rp235.000 yang telah dibatalkan melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Permohonan Void Bast Nomor B.140/PSDKPLan.1/KU.110/I/2026 masih tercatat.
- Belanja barang persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin berasal dari belanja pemeliharaan dan suku cadang.
- Transfer suku cadang berupa suku cadang dari kapal pengawas Hiu Macan 05 senilai Rp550.027.664 dan

perolehan lainnya senilai Rp217.005.008 berasal dari pembelian perlengkapan dan peralatan kapal pengawas HMC 05, Hiu 12 dan Napoleon 045.

- Beban persediaan barang konsumsi senilai Rp97.583.527 berasal dari habis pakai barang konsumsi dan beban persediaan suku cadang senilai Rp885.108.994 adalah habis pakai peralatan dan perlengkapan kapal pengawas Hiu Macan 05, Hiu 12, kapal kelas V Napoleon 045, Baramundi 01 dan *Rigit Inflatable Boat* senilai Rp457.981.911 dan hasil opname fisik senilai Rp427.127.033.

Rincian item realisasi anggaran mutasi kurang berupa habis pakai barang konsumsi dan habis pakai suku cadang disajikan pada tabel dibawah ini:

KODE	U R A I A N	NILAI
117111	Barang Konsumsi	-97.583.527
1010301001	Alat Tulis	-1.146.700
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	-50.000
1010301003	Penjepit Kertas	-236.300
1010301004	Penghapus/Korektor	-15.000
1010301005	Buku Tulis	-97.000
1010301006	Ordner Dan Map	-273.500
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	-136.000
1010301010	Alat Perekat	-150.000
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	-4.020.600
1010302001	Kertas HVS	-10.651.500
1010302002	Berbagai Kertas	-19.500
1010302003	Kertas Cover	-40.000
1010304004	Tinta/Toner Printer	-7.345.000
1010304006	USB/Flash Disk	-2.273.500
1010304009	Harddisk Internal	-2.700.000
1010304010	Mouse	-725.000
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	-13.533.000
1010306001	Kabel Listrik	-42.142.500
1010306002	Lampu Listrik	-1.661.000
1010306003	Stop Kontak	-80.000
1010306004	Saklar	-15.000
1010306010	Batu Baterai	-933.000
1010306999	Alat Listrik Lainnya	-6.041.300
1010307001	Bahan Baku Pakaian	-1.960.000
1010307004	Penutup Tangan	-90.000
1010309003	Stempel	-180.000
1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan	-920.127
1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor	-13.000
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor	-135.000
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	-8.991.000
1010305003	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya	-8.991.000
117114	Suku Cadang	-457.981.911
1010202002	Suku Cadang Alat Besar Apung	-15.196.344
1010201003	Suku Cadang Lainnya	-14.988.500
TOTAL		-564.556.438

*Persediaan yang
Belum Diregister
Rp0*

C.14 Persediaan yang Belum Diregister Rp0.

Persediaan yang belum Diregister Tahun 2025 Audited yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 Audited masing-masing Rp0. dan Rp0.

<i>Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp0</i>	C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaian atau tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Tahun 2025 <i>Audited</i> yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 <i>Audited</i> masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0.
<i>Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Rp0</i>	C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Tahun 2025 <i>Audited</i> yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 <i>Audited</i> masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.
<i>Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya Rp0</i>	C.17 Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya Tahun 2025 <i>Audited</i> yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 <i>Audited</i> masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang Rp0

C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Tahun 2025 Audited yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 Audited masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah
Rp6.263.317.551

C.19 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo Tahun 2025 Audited yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 Audited adalah tetap senilai Rp6.263.317.551.

Saldo Nilai Perolehan Tahun 2024 Audited	Rp 6.263.317.551
Mutasi Tambah :	
Pembelian	-
Selisih Revaluasi Aset	-
Hibah	-
Reklasifikasi	-
Pengembangan Melalui KDP	-
Mutasi Kurang :	
Koreksi pencataan nilai/kuantitas(-)	-
Penghapusan	
Saldo 31 Desember 2025 Audited	6.263.317.551
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	-
Nilai Buku 31 Desember 2025 Audited	Rp 6.263.317.551

Tanah Belum
Diregister Rp0

C.20 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap tanah belum diregister Tahun 2025 Audited yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 Audited masing-masing Rp0. dan Rp0.

*Peralatan dan
Mesin
Rp78.122.917.521*

C.21 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 *Audited* adalah Rp78.122.917.521 dan Rp46.350.966.244 terjadi kenaikan sebesar Rp31.771.951.277 atau 68,55 persen. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Tahun 2024 Audited	46.350.966.244
Mutasi tambah:	31.791.043.277
Penambahan saldo awal	
Pembelian (intrakompetable)	2.146.573.482
Transfer masuk	27.839.352.120
Perolehan lainnya	87.276.000
Reklasifikasi masuk	1.717.841.675
Mutasi kurang:	(19.092.000)
Transfer keluar	(19.092.000)
Reklasifikasi Keluar	-
Penghentian dari penggunaan	
Saldo 31 Desember 2025 Audited	78.122.917.521
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2025	(75.619.519.095)
Nilai Buku 31 Desember 2025 Audited	2.503.398.426

Rincian mutasi tambah baik berupa pembelian (*intrakompetable*) maupun transfer masuk disajikan dalam tabel dibawah ini:

Rincian Pembelian (intrakompetable) Tahun 2025 Audited yang berakhir pada 31 Desember 2025

No.	Uraian	Volume	Satuan	Nilai
1.	Sepeda Motor	2	Unit	55.990.000
2.	Mesin Speedboat/ Motor Tempel	2	Unit	1.703.507.000
3.	Alat Scanner	4	Buah	25.308.000
4.	Lemari Besi/ Metal	1	Buah	2.791.650
5.	Alat Kantor Lainnya	15	Unit	102.097.800
6.	Meja Kerja Besi/ Metal	1	Buah	1.561.092
7.	Meja Kerja Kayu	2	Buah	4.999.440
8.	Kasur/ Springbed	1	Buah	5.494.500
9.	AC Split	10	Unit	64.279.000
10.	Vertikal Blind	1	Buah	10.000.000
11.	Microphone wireless MIC	1	Buah	1.830.000
12.	Mixer Sound System	1	Unit	1.930.000
13.	Alat Komunikasi Telephon Lainnya	6	Unit	76.368.000
14.	Tablet PC	1	Buah	8.499.000
15.	Laptop	6	Unit	81.918.000
		54		2.146.573.482

Mutasi tambah dari perolehan lainnya dengan jumlah barang 1 (satu) unit berupa Kapal penangkap Ikan senilai Rp87.276.000 merupakan barang hasil Rampasan Kejaksaan RI sesuai dengan Berita Acara No. 689/SJ/PL.450/VII/2025 dan B.2287/DJPSDKP.1/PL.450/VII/2025

Reklasifikasi masuk senilai Rp1.717.841.675 berasal dari speedboat Napoleon 08 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara nomor B.2903/DJPSDKP.1/PL.450/IX/2025 tanggal 4 September 2025.

Transfer masuk dari pangkalan PSDKP Batam berupa peralatan dan perlengkapan kapal Pengawas Hiu Macan 05 senilai Rp27.839.235.120 sesuai dengan nomor BAST B.236/PSDKPLan.1/PL.760/I/2025 Tanggal 1 Januari 2025.

Rincian Transfer Masuk Tahun 2025 Audited yang berakhir pada 31 Desember 2025

Akun	Uraian	Kuantitas	Nilai
132111	PERALATAN DAN MESIN	123	27.839.352.120
30103	ALAT BANTU	2	9.038.500
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	1	14.500.000
30203	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	1	26.044.915.000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	4	88.631.510
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	9	37.226.400
30303	ALAT UKUR	1	1.760.000
30501	ALAT KANTOR	12	427.826.000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	50	247.064.350
30601	ALAT STUDIO	5	34.769.300
30602	ALAT KOMUNIKASI	13	67.311.000
30604	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	2	519.900.000
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	3	10.950.000
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	1	84.400.000
31001	KOMPUTER UNIT	7	100.117.610
31002	PERALATAN KOMPUTER	5	15.516.850
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	1	3.550.000
31503	ALAT SAR	5	131.875.600

- Alat angkutan bermotor pada akun 30210 sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp14.500.000 merupakan nilai sepeda motor lama pada kapal pengawas Hiu Macan 05 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B.7/PSDKPLan.1/PL.510/II/2025 Tanggal 1 Januari 2025.
- Transfer keluar dari Pangkalan PSDKP Lampulo ke sesdit senilai Rp19.092.000 berupa satu unit laptop sesuai dengan BAST no. B.235/PSDKPSta.4/PL.450/VI/2025 Tanggal 16 Juni 2025.

*Peralatan dan
Mesin Belum
Diregister Rp0*

C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 *Audited* masing-masing Rp0. dan Rp0.

*Gedung dan
Bangunan
Rp15.310.155.758*

C.23 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 *Audited* adalah Rp15.310.155.758 dan Rp15.243.825.758. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Tahun 2024 Audited	15.243.825.758
Mutasi Tambah:	
Perolehan dengan KDP	30.830.000
Pengembangan dengan KDP	37.000.000
Reklasifikasi masuk	
Koreksi nilai tim penertiban aset (+)	
Barang tidak ditemukan hasil inventarisasi	
Barang berlebih hasil inventarisasi	
Mutasi Kurang:	
Koreksi nilai tim penertiban aset (-)	
Koreksi semu hasil penilaian kembali	
Reklasifikasi keluar	
Koreksi pencatatan nilai/kuantitas(-)	(1.485.000)
Penghentian aset dari penggunaan	-
Saldo 31 Desember 2025 Audited	15.310.155.758
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(2.132.937.830)
Nilai Buku 31 Desember 2025 Audited	13.177.217.928

Perolehan dengan KDP sebesar Rp30.830.000 adalah belanja pekerjaan Penataan Halaman Upacara Kantor Pangkalan PSDKP Lampulo berdasarkan BAST Nomor 0703.4/PSDKPLan.1/PL.430/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025.

Perolehan dengan pengembangan KDP sebesar Rp37.000.000 adalah belanja modal pekerjaan Renovasi pos jaga Pangkalan PSDKP Lampulo berdasarkan BAST Nomor 0704.6/PSDKPLan.1/PL.430/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025.

Mutasi kurang adalah koreksi pencatatan nilai/ kuantitas sebesar Rp1.485.000 atas nilai aset non revaluasi atas pengembalian lebih bayar item pekerjaan listrik dan air senilai Rp1.500.000 untuk pekerjaan Pembangunan Kontruksi Kantor Satwas SDKP Padang dengan nilai kontrak Rp1.306.857.800 yang telah selesai pada bulan Desember Tahun 2024.

Rincian nilai mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan disajikan sebagai berikut:

Akun	Uraian	Kuantitas	Nilai	Penyusutan	Nilai Buku
133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	37	18.310.155.758	(2.132.937.830)	13.177.217.928
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	26	12.303.091.911	(1.596.555.678)	10.706.536.233
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	6	2.176.491.618	(426.735.476)	1.749.756.142
40301	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	1	66.835.000	(16.708.752)	50.126.248
40401	TUGU/TANDA BATAS	4	763.737.229	(92.937.924)	670.799.305

*Gedung dan
Bangunan Belum
Diregister Rp0*

C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Nilai Gedung dan Bangunan Belum Diregister Tahun 2025 Audited yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 Audited masing-masing Rp0. dan Rp0.

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi
Rp2.323.630.762*

C.25 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2025 Audited yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 Audited masing-masing sebesar Rp2.323.630.762 dan Rp2.100.578.762 terjadi kenaikan sebesar Rp223.052.000 atau 10,62%.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Tahun 2024 Audited	2.100.578.762
Mutasi tambah:	223.052.000
Belanja Modal jaringan (Jaringan listrik)	193.052.000
Jaringan Distribusi	
Jalan dan Jembatan	
Irigasi	30.000.000
Reklasifikasi masuk	-
Transfer masuk Nilai Jalan, Jaringan, irigasi	-
Mutasi kurang:	-
Koreksi semu hasil penilaian kembali	-
Koreksi pencataan nilai/kuantitas(-)	-
Saldo 31 Desember 2025 Audited	2.323.630.762
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(698.201.532)
Nilai Buku 31 Desember 2025 Audited	1.625.429.230

Belanja modal jaringan adalah Pembangunan Jaringan Listrik (Jaringan Listrik darat Untuk Kapal Pengawas) dengan daya 66 kVA dengan Nilai Perolehan Rp193.052.000 yang dilaksanakan oleh CV. PT. Hidayat Sumber Energi berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 0443/PSDKPlan.1/PL.421/VIII/2025 Tanggal 21 Agustus 2025 dan BAST Nomor 0452/PSDKPlan.1/PL.430/VIII/2025 Tanggal 26 Agustus 2025.

Rincian nilai mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan sebagai berikut:

Akun	Uraian	Kuantitas	Nilai	Penyusutan	Nilai Buku
134111	JALAN DAN JEMBATAN	933	640.828.171	(444.503.596)	196.324.575
134112	IRIGASI	5	1.145.452.260	(200.604.784)	944.847.476
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	1	402.296.000	(60.344.400)	341.951.600
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	1	386.120.000	(65.030.736)	321.089.264
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	1	229.432.000	(65.005.739)	164.426.261
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	1	107.800.260	(3.292.509)	104.507.751
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	1	19.804.000	(6.931.400)	12.872.600
134113	JARINGAN	17	537.350.331	(53.093.152)	484.257.179
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	3	12.849.908	(6.351.766)	6.498.142
50402	JARINGAN LISTRIK	8	487.770.765	(23.085.633)	464.685.132
50403	JARINGAN TELEPON	6	36.729.658	(23.655.753)	13.073.905
	TOTAL		2.323.630.762	(698.201.532)	1.625.429.230

Jalan, Jambatan dan Irigasi yang Belum Diregister Rp0

C.26 Jalan, Jembatan dan Irigasi Belum Diregister

Nilai Jalan, Jembatan dan Irigasi yang Belum Diregister Tahun 2025 Audited yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 Audited masing-masing Rp0. dan Rp0.

Aset Tetap Lainnya Rp0

C.27 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap

Lainnya Tahun 2025 Audited yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 Audited masing-masing adalah Rp0.

Saldo Nilai Perolehan Tahun 2024 Audited	0
Mutasi tambah:	
-	
Mutasi kurang:	0
-	0
Saldo 31 Desember 2025 Audited	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	0
Nilai Buku 31 Desember 2025 Audited	0

Aset Tetap Belum Diregister C.28 Aset Tetap Belum Diregister

Diregister Rp0.

Aset Tetap yang Belum Diregister Tahun 2025 Audited yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 Audited masing-masing Rp0 dan Rp0.

Konstruksi

Dalam

Pengerjaan Rp0

C.29 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2025 Audited yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 Audited adalah Rp0 dan Rp10.000.000.

Mutasi KDP adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Tahun 2024 Audited	10.000.000
Mutasi tambah:	-
Gedung dan bangunan dalam pengerjaan	-
Mutasi kurang:	(10.000.000)
KDP yang dihentikan dari Operasi	(10.000.000)
Selisih	-
Saldo 31 Desember 2025 Audited	-

Saldo KDP Tahun 2024 Audited adalah senilai Rp10.000.000 dimana nilai tersebut merupakan nilai KDP Perencanaan Penataan Lingkungan Komplek Satwas SDKP Aceh Barat pada tahun 2024.

Pada pertengahan tahun 2025 telah diusulkan penghapusan/penghentian KDP sesuai surat Berita Acara Inventarisasi Barang Milik Negara No. B. 1036.1/PSDKPLan.1/PL.710/VII/2025 tanggal 30 Juni 2025. Penghapusan KDP ditambahkan ke dalam aset lainnya.

Akumulasi

Penyusutan Aset

Tetap

Rp(78.450.658.457)

C.30 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025 Audited yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 Audited masing-masing senilai Rp(78.450.658.457) dan Rp(44.186.174.056) terjadi kenaikan sebesar Rp(34.264.484.401) atau 77,55%.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025 Audited yang berakhir 31 Desember 2025 sebagai berikut:

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	6.263.317.551	-	6.263.317.551
2	Peralatan dan Mesin	78.122.917.521	(75.619.519.095)	2.503.398.426
3	Gedung dan Bangunan	15.310.155.758	(2.132.937.830)	13.177.217.928
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.323.630.762	(698.201.532)	1.625.429.230
5	Konstruksi Dalam pengerjaan	-	-	-
Total		102.020.021.592	(78.450.658.457)	23.569.363.135

Kemitraan

dengan Pihak

Ketiga Rp0

C.31 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahun 2025 Audited yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 Audited

adalah Rp0. dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki.

Aset Tak

C.32 Aset Tak Berwujud

Berwujud Rp0

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) Tahun 2025 Audited yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 Audited adalah Rp0. dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Tak

C.33 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

*Berwujud Dalam
Pengerjaan Rp0*

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Tahun 2025 Audited yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 Audited masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Aset Lain-Lain

C.34 Aset Lain-Lain

Rp10.000.000

Saldo Aset Lain-lain Tahun 2025 Audited yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 Audited adalah Rp10.000.000 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas dan sedang dalam proses usulan penghapusan.

Perbandingan Aset Lain-lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 Audited dan 2024 Audited

Uraian	31 Desember 2025 Audited	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
KDP Yang dihentikan	-	-	
Aset Lain	10.000.000	-	
Jumlah	10.000.000	-	
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	-	-	-
Jumlah	10.000.000	-	

Adapun rincian mutasi Aset lainnya adalah:

Saldo Nilai Perolehan Tahun 2024 Audited	10.000.000
Mutasi tambah:	-
Aset yang tidak digunakan	-
Mutasi kurang:	-
Penghapusan KDP/ BMN	-
Saldo 31 Desember 2025 Audited	10.000.000
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	10.000.000

*Aset Lainnya
Belum Diregister
Rp0*

C.35 Aset Lainnya Belum Diregister

Aset Lainnya yang Belum Diregister Tahun 2025 Audited yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 Audited masing-masing Rp0. dan Rp0.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp0*

C.36 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2025 Audited yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 Audited masing-masing Rp0. dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat

yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp26.166.864*

C.37. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 *Audited* masing-masing sebesar Rp26.166.864 dan Rp33.188.699 terjadi penurunan sebesar (Rp7.021.835) atau 21,16 persen. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Utang kepada pihak ketiga Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 tersebut disajikan pada rincian berikut:

No	Uraian	Nilai
1.	Belanja Langganan Listrik Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo Tagihan Bulan Desember Tahun 2025	15.924.478
2.	Belanja Langganan Internet dan Telepon Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo Tagihan Bulan Desember Tahun 2025	10.000.461
3.	Belanja Langganan Air Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo Tagihan Bulan Desember Tahun 2025	241.925
Total Belanja Barang yang masih harus dibayar		26.166.864

Uraian rincian utang kepada pihak ketiga Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut berikut:

No	Uraian	Nilai
Belanja Langganan Listrik		15.924.478
1	Tagihan listrik satuan pengawasan perikanan (Kapal)	1.754.776
2	Tagihan listrik Kantor Satker PP II (Kantor & Mess)	6.676.658
3	Tagihan listrik Pos wilker SDKP Sabang	264.892
4	Tagihan listrik Satwas SDKP Padang	4.491.259
5	Tagihan listrik Wilker PSDKP Carocok Tarusan	99.188
6	Tagihan listrik kantor Satwas SDKP Sibolga	2.125.992
7	Tagihan listrik mess Satwas SDKP Sibolga	511.713
Belanja Langganan Telepon/Internet		10.000.461
1	Tagihan Telepon Pangkalan Lampulo	2.350.858
2	Tagihan Internet Pangkalan Lampulo	2.684.000
3	Tagihan Internet Pos wilker SDKP Sabang	825.400
4	Tagihan Telepon Satwas SDKP Padang	40.186
5	Tagihan Internet Satwas SDKP Padang	525.270
6	Tagihan Internet Wilker SDKP Carocok Tarusan	629.600
7	Tagihan Telepon Satwas SDKP Sibolga	35.857
8	Tagihan Internet Satwas SDKP Aceh Barat	1.525.370
9	Tagihan Internet SDKP Simeulu/ Wilker Tapaktuan	718.400
10	Tagihan Telepon SDKP Simeulu	35.480
11	Tagihan Internet Satwas SDKP Bengkulu	630.040
Belanja Langganan Air		241.925
1	Tagihan Air Wilker SDKP Carocok Tarusan	48.000
2	Tagihan Air Kantor Satwas SDKP Sibolga	166.617
3	Tagihan Air Mess Satwas SDKP Sibolga	27.308

*Nilai Utang Yang
Belum
Ditagihkan Rp0*

C.38 Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang yang belum ditagihkan Tahun 2025 Audited yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 Audited masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan adalah transaksi keuangan yang dilakukan penginputan di Bulan Desember 2025 pada modul komitmen, namun SPM terbit pada Bulan Januari 2026.

*Hibah yang
Belum Disahkan
Rp0.*

C.39 Hibah yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan Tahun 2025 Audited yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 Audited masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan.

<i>Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp0</i>	C.40 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Tahun 2025 <i>Audited</i> yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 <i>Audited</i> masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.
<i>Pendapatan Diterima Dimuka Rp0</i>	C.41 Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 <i>Audited</i> yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 <i>Audited</i> masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.
<i>Uang Muka dari KPPN Rp0</i>	C.42 Uang Muka dari KPPN Saldo Uang Muka dari KPPN Tahun 2025 <i>Audited</i> yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 <i>Audited</i> masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.
<i>Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0</i>	C.43 Utang Jangka Pendek Lainnya Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2025 <i>Audited</i> yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 <i>Audited</i> masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain-lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar
Rp26.166.864*

C.44 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 senilai **Rp26.166.864** merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

No	Uraian	Nilai
1.	Belanja Langganan Listrik Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo Tagihan Bulan Desember Tahun 2025	15.924.478
2.	Belanja Langganan Internet dan Telepon Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo Tagihan Bulan Desember Tahun 2025	10.000.461
3.	Belanja Langganan Air Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo Tagihan Bulan Desember Tahun 2025	241.925
Total Belanja Barang yang masih harus dibayar		26.166.864

Beban barang yang masih harus dibayar tersebut telah dibayarkan pada awal tahun 2026 sesuai dengan tagihan.

*Ekuitas
Rp24.027.743.861*

C.45 Ekuitas

Ekuitas Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 *Audited* masing-masing sebesar **Rp24.027.743.861** dan **Rp25.969.887.937** terjadi penurunan ekuitas senilai Rp(1.942.144.076) atau 7,48%.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penurunan ekuitas dari Rp25.969.887.937 menjadi Rp24.027.743.861 pada tahun 2025 *Audited* menunjukkan bahwa entitas mengalami pengurangan kekayaan bersih sebesar Rp(1.942.144.076) (7,48%) yang mencerminkan adanya tekanan dari sisi operasional, koreksi aset, peningkatan kewajiban, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan
PNBP Rp0*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 *Audited* adalah sebesar Rp0 dan Rp4.163.750.

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Tahun 2025 Audited yang Berakhir 31 Desember 2025 dan
2024 Audited*

URAIAN	31 Desember 2025 <i>Audited</i>	31 Desember 2024	NAIK TURUN (%)
Pendapatan Operasional	0	4.163.750	
Jumlah	0	4.163.750	0

Berdasarkan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp0.

*Beban Pegawai
Rp9.963.618.662*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 *Audited* adalah masing-masing sebesar Rp9.963.618.662,00 dan Rp9.008.334.550,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban pegawai Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 disajikan pada rincian sebagai berikut:

*Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 Audited yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024 Audited*

URAIAN	31 Desember 2025 <i>Audited</i>	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	2.607.964.900	2.523.850.500	3.33
Beban Pembulatan Gaji PNS	35.284	36.675	(3.79)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	198.374.600	186.332.040	6.46
Beban Tunj. Anak PNS	71.638.652	66.337.572	7.99
Beban Tunj. Struktural PNS	26.280.000	32.760.000	(19.78)
Beban Tunj. Fungsional PNS	70.610.000	63.990.000	10.35
Beban Tunj. PPh PNS	13.196.301	12.705.076	3.87
Beban Tunj. Beras PNS	163.886.460	156.427.200	4.77
Beban Uang Makan PNS	306.328.000	233.910.000	30.96
Beban Tunjangan Umum PNS	86.030.000	81.320.000	5.79
Beban Gaji Pokok PPPK	974.572.800	799.624.400	21.88
Beban Pembulatan Gaji PPPK	17.667	17.266	2.32
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	73.903.880	57.132.050	29.36
Beban Tunjangan Anak PPPK	23.976.662	20.346.916	17.84
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	70.320.000	69.600.000	1.03
Beban Tunjangan Beras PPPK	71.695.800	59.311.980	20.88
Beban Uang Makan PPPK	102.919.000	52.885.000	94.61
Beban Tunjangan Umum PPPK	11.400.000	-	-
Beban Uang Lembur	121.912.000	180.871.000	(32.60)
Beban Uang Lembur PPPK	54.682.000	38.330.000	42.66
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	3.629.613.476	3.314.943.259	9.49
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1.284.261.180	1.057.603.616	21.43
Jumlah Beban	9.963.618.662	9.008.334.550	10.60

Beban pegawai Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 meningkat sebesar Rp955.284.112 atau 10,60 persen jika dibandingkan Tahun 2024 *Audited*.

Kenaikan beban pegawai sebesar 10,60% disebabkan oleh Perubahan 18 PPNN menjadi PPPK 18 meliputi 11 golongan IX, 3 golongan VII, 4 golongan V berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 6/KEPMEN-KP/KP.320/IX/2025 tanggal 16 September 2025. Penjelasan lebih lanjut atas perbedaan belanja dan beban pegawai berdasarkan Neraca Percobaan AkruaL dan Laporan Realisasi Anggaran disajikan pada tabel berikut:

*Rincian Perbedaan Belanja dan Beban Pegawai
Tahun 2025 Audited yang Berakhir 31 Desember 2025*

URAIAN	BELANJA LRA	BEBAN LO	SELISIH
Belanja Gaji Pokok PNS	2.607.964.900	2.607.964.900	-
Belanja Pembulatan Gaji PNS	35.403	35.284	119
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	198.374.600	198.374.600	-
Belanja Tunj. Anak PNS	71.638.652	71.638.652	-
Belanja Tunj. Struktural PNS	26.280.000	26.280.000	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	70.610.000	70.610.000	-
Belanja Tunj. PPh PNS	13.264.013	13.196.301	67.712
Belanja Tunj. Beras PNS	163.886.460	163.886.460	-
Belanja Uang Makan PNS	306.328.000	306.328.000	-
Belanja Tunjangan Umum PNS	86.030.000	86.030.000	-
Belanja Gaji Pokok PPPK	974.572.800	974.572.800	-
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	17.667	17.667	-
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	73.903.880	73.903.880	-
Belanja Tunjangan Anak PPPK	23.976.662	23.976.662	-
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	70.320.000	70.320.000	-
Belanja Tunjangan Beras PPPK	71.695.800	71.695.800	-
Belanja Uang Makan PPPK	102.919.000	102.919.000	-
Belanja Tunjangan Umum PPPK	11.400.000	11.400.000	-
Belanja Uang Lembur	121.912.000	121.912.000	-
Belanja Uang Lembur PPPK	54.682.000	54.682.000	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	3.629.613.476	3.629.613.476	-
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1.284.261.180	1.284.261.180	-
Jumlah Belanja	9.963.686.493	9.963.618.662	67.831

Selisih senilai Rp67.831 adalah Belanja Pembulatan Gaji PNS dan Belanja Tunj. PPh PNS. Kelebihan belanja pembulatan gaji PNS dan belanja kelebihan tunjangan PPh PNS sudah dikembalikan sehingga tidak ada lagi selisih di Neraca Percobaan Kas.

Beban

Persediaan

Rp97.348.527

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Tahun 2025 Audited yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 Audited masing-masing sebesar Rp97.348.527 dan Rp377.227.567. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan

Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 *Audited* adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan yang Berakhir 31 Desember
2025 Audited dan 2024 Audited*

URAIAN	31 Desember 2025 Audited	31 Desember 2024	NAIK/ (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	97.348.527	377.227.567	(74.19)
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	97.348.527	377.227.567	(74.19)

Beban persediaan Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 74,01 persen dibandingkan Tahun 2024 *Audited*. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Penjelasan perbandingan Belanja dan Beban Persediaan Konsumsi Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

URAIAN	BELANJA LRA	BEBAN LO	SELISIH
Beban Persediaan Konsumsi	53.536.600	97.348.527	(43.811.927)
Jumlah	53.536.600	97.348.527	(43.811.927)

Selisih sebesar Rp43.811.927 antara Belanja Persediaan Konsumsi (LRA) dan Beban Persediaan Konsumsi (LO) terjadi karena pemakaian persediaan yang berasal dari saldo awal atau periode sebelumnya, yang diakui sebagai beban secara akrual pada tahun 2025.

*Beban Barang
dan Jasa
Rp14.455.009.654*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 *Audited* adalah masing-masing sebesar **Rp14.455.009.654** dan **Rp9.356.113.160**. Beban Barang dan Jasa terdiri dari

beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 *Audited* adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa yang Berakhir 31 Desember 2025 Audited dan 2024 Audited

URAIAN	TA. 2025	TA. 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	1.246.175.820	1.729.604.643	(27.95)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	185.615.830	155.341.915	19.49
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.412.100	11.901.300	(54.53)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	109.710.000	118.656.000	(7.54)
Beban Barang Operasional Lainnya	432.933.600	414.386.700	4
Beban Bahan	10.445.768.700	5.010.833.260	108.46
Beban Honor Output Kegiatan	27.100.000	20.750.000	31
Beban Barang Non Operasional Lainnya	812.894.367	797.291.160	1.96
Beban Langganan Listrik	281.580.090	284.899.303	(1.17)
Beban Langganan Telepon	149.761.693	158.956.896	(5.78)
Beban Langganan Air	11.145.125	11.927.790	(6.56)
Beban Sewa	47.601.667	136.113.333	(65.03)
Beban Jasa Profesi	0	39.000.000	(100)
Beban Jasa Lainnya	699.310.662	466.450.860	49.92
Total	14.455.009.654	9.356.113.160	54.50

Berdasarkan tabel, total Beban Barang Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp14.455.009.654, meningkat signifikan dibanding Tahun 2024 *Audited* sebesar Rp9.356.113.160, atau naik Rp5.098.896.494 (54,50%).

Kenaikan Beban Barang sebesar 54,50% pada Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 disebabkan oleh lonjakan Beban Bahan dan Jasa Pendukung Operasional, yang mencerminkan peningkatan intensitas dan kebutuhan

kegiatan utama. Di sisi lain, penurunan signifikan pada biaya perkantoran, utilitas, honor operasional, dan jasa profesi menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tetap diterapkan secara selektif dan rasional.

Kenaikan terbesar terjadi pada belanja penambahan daya tahan tubuh (19,49%), barang operasional lainnya (4%), belanja bahan (108,6%) yang meliputi *BBM, pelumas, dukungan operasional kapal pengawas/ kapal kelas V/speedboat, logistik, dukungan operasi Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan/Perikanan dan penanganan pelanggaran*, honor output kegiatan (31%), barang non operasional lainnya (1,96%) dan beban jasa lainnya (49,62%).

Rincian Belanja dan Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

URAIAN	BELANJA LRA	BEBAN LO	SELSEH
Beban Keperluan Perkantoran	1.246.175.820	1.246.175.820	-
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	185.615.830	185.615.830	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.412.100	5.412.100	-
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	109.710.000	109.710.000	-
Beban Barang Operasional Lainnya	432.933.600	432.933.600	-
Beban Bahan	10.445.768.700	10.445.768.700	-
Beban Honor Output Kegiatan	27.100.000	27.100.000	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	812.894.367	812.894.367	-
Beban Langganan Listrik	285.536.109	281.580.090	3.956.019
Beban Langganan Telepon	152.767.826	149.761.693	3.006.133
Beban Langganan Air	11.204.808	11.145.125	59.683
Beban Sewa	43.435.000	47.601.667	(4.166.667)
Beban Jasa Lainnya	699.310.662	699.310.662	-
Jumlah	14.457.864.822	14.455.009.654	2.855.168

Belanja Barang Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tercatat sebesar Rp14.457.864.822, sedangkan Beban

Barang pada Laporan Operasional (LO) tercatat sebesar Rp14.455.009.654, sehingga terdapat selisih sebesar Rp2.855.168.

Selisih antara Belanja Barang (LRA) dan Beban Barang (LO) tersebut terutama disebabkan oleh perbedaan waktu pengakuan beban, khususnya pada akun belanja langganan, yang telah direalisasikan secara kas pada tahun berjalan namun sebagian manfaat ekonominya baru diakui sebagai beban pada periode berikutnya. Adapun rincian selisih tersebut berasal dari:

- ✓ Belanja Langganan Listrik sebesar Rp3.956.019,
- ✓ Belanja Langganan Telepon/Internet sebesar Rp3.006.133,
- ✓ Belanja Langganan Air sebesar Rp59.683.

Perbedaan tersebut dikompensasikan oleh Belanja Sewa sewa 2 (dua) ruang pelayanan yang pada LRA lebih kecil dibandingkan pengakuan beban pada LO sebesar Rp4.166.667, sehingga secara bersih menghasilkan selisih akhir sebesar Rp2.855.168.

Selisih tersebut merupakan utang beban langganan bulan Desember 2025 yang pembayarannya dilakukan pada Tahun Anggaran 2026 dengan total nilai Rp26.166.864, terdiri dari:

- Belanja Langganan Listrik sebesar Rp15.924.478,
- Belanja Langganan Internet dan Telepon sebesar Rp10.000.461, dan
- Belanja Langganan Air sebesar Rp241.925.

Dengan demikian, selisih antara Belanja Barang (LRA) dan Beban Barang (LO) telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis

akrual, serta mencerminkan kewajiban yang masih harus dibayarkan pada periode berikutnya.

*Beban
Pemeliharaan
Rp2.437.268.426*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan terdiri dari beban pemeliharaan gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, beban persediaan bahan untuk pemeliharaan, dan beban persediaan suku cadang. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 *Audited* masing-masing sebesar Rp2.437.268.426 dan Rp2.875.079.568. Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan yang Berakhir 31 Desember 2025 Audited dan 2024 Audited

URAIAN	31 Desember 2025 Audited	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	251.696.600	496.395.055	(49.30)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.253.983.382	1.427.199.518	(12.14)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	8.000.000	27.240.925	(70.63)
Beban Pemeliharaan Jaringan	29.488.500	18.606.520	58.48
Beban Pemeliharaan Irigasi	0	10.340.000	(100.00)
Beban Persediaan Suku Cadang	885.108.944	895.297.550	(1.14)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	8.991.000	0	#DIV/o!
Total	2.437.268.426	2.875.079.568	(15.23)

Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp2.437.268.426 dan mengalami penurunan sebesar Rp437.809.142 atau 15,23 persen dibandingkan Tahun 2024 *Audited* sebesar Rp2.875.079.568.

Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya realisasi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar 49,30 persen, serta Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar 12,14 persen, seiring dengan telah terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan utama pada tahun sebelumnya dan penerapan kebijakan efisiensi anggaran pada Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan juga mengalami penurunan sebesar 70,63 persen karena tidak dilaksanakannya kegiatan pemeliharaan berskala besar pada periode berjalan. Beban Pemeliharaan Irigasi tidak terealisasi pada Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 karena tidak terdapat kebutuhan pemeliharaan atas aset dimaksud.

Di sisi lain, terdapat peningkatan pada Beban Pemeliharaan Jaringan sebesar 58,48 persen, yang disebabkan oleh kebutuhan pemeliharaan jaringan pendukung operasional. Beban Pemeliharaan Suku Cadang mengalami penurunan tipis sebesar 0,14 persen, sedangkan Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan hanya terealisasi pada Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dalam jumlah relatif kecil.

Rincian Belanja dan Beban Pemeliharaan Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

URAIAN	BELANJA LRA	BEBAN LO	SELISIH
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	251.696.600	251.696.600	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.253.983.382	1.253.983.382	-
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	8.000.000	8.000.000	-
Beban Pemeliharaan Jaringan	29.488.500	29.488.500	-
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan dan suku cadang	646.036.087	894.099.944	(248.063.857)
Total	2.189.204.569	2.437.268.426	(248.063.857)

Berdasarkan data realisasi anggaran pada periode laporan, terdapat perbedaan (selisih) antara pencatatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berbasis kas dan pengakuan beban pada Laporan Operasional (LO) berbasis akrual sebesar Rp (248.063.857). Nilai beban LO yang lebih tinggi dari belanja LRA ini disebabkan oleh penggunaan/pemakaian persediaan yang tersedia dari periode sebelumnya dan sisa persediaan dari pembelian periode berjalan.

Beban Perjalanan Dinas **D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Dinas

Rp997.088.120

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 *Audited* masing-masing sebesar **Rp997.088.120** dan **Rp4.318.865.706**. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 *Audited* adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas yang Berakhir 31
Desember 2025 Audited dan 2024 Audited*

URAIAN	31 Desember 2025 <i>Audited</i>	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	952.355.237	3.676.278.050	(74.09)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.389.000	130.240.000	(89.72)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	31.343.883	30.000.000	4.48
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		470.942.136	(100)
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri		11.405.520	(100)
Total	997.088.120	4.318.865.706	(76.91)

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 76,91 persen jika dibandingkan Tahun 2024 *Audited*. Hal ini karena kebijakan efisiensi anggaran yang mengharuskan pemangkasan anggaran belanja perjalanan dinas sebesar 53,9 persen.

Rincian Belanja dan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 sebagai berikut:

URAIAN	BELANJA LRA	BEBAN LO	SELISIH
Beban Perjalanan Dinas Biasa	952.355.237	952.355.237	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.389.000	13.389.000	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	31.343.883	31.343.883	-
Total	997.088.120	997.088.120	-

Tidak ada perbedaan antara belanja perjalanan dinas pada LRA dan beban perjalanan dinas pada Laporan operasional.

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 *Audited* masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau

jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 *Audited* masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp5.025.843.615

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 *Audited* masing-masing sebesar Rp5.025.843.615 dan Rp5.314.640.591. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 *Audited* sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi yang Berakhir
31 Desember 2025 Audited dan 2024 Audited*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 Desember 2025 <i>Audited</i>	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.617.568.948	4.939.514.109	(6.52)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	314.943.402	278.564.322	13.06
Beban Penyusutan Jalan dan jembatan	54.794.450	63.641.184	(13.90)
Beban Penyusutan Irigasi	26.637.602	25.290.099	5.33
Beban Penyusutan Jaringan	11.899.213	7.630.877	55.94
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.025.843.615	5.314.640.591	(5.43)

Beban Penyusutan dan Amortisasi aset pada Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 menurun sebesar 5,43 persen.

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 *Audited* masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Surplus/ Defisit
Dari Kegiatan
Operasional
Rp32.976.177.004*

D.11 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional

Jumlah Surplus (*Defisit*) dari Kegiatan Operasional Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 *Audited* masing-masing defisit sebesar Rp(32.976.177.004) dan Rp(31.246.097.392).

*Rincian Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional yang
Berakhir 31 Desember 2025 Audited dan 2024 Audited*

URAIAN	31 Desember 2025 <i>Audited</i>	31 Desember 2024	NAIK (TURUN)%
Defisit dari Kegiatan Operasional	(32.976.177.004)	(31.246.097.392)	5.54
Jumlah Surplus (Defisit)	(32.976.177.004)	(31.246.097.392)	5.54

Surplus (Defisit)
Penyelesaian
Kewajiban
Jangka Panjang
Rp0

D.12 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 *Audited* masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Surplus (Defisit)
dari Kegiatan
Non Operasional
Rp96.576.000

D.13 Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional

Pos Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 *Audited* masing-masing surplus sebesar Rp96.576.000 dan defisit Rp330.304.839 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional yang Berakhir 31 Desember 2025 Audited dan 2024 Audited

URAIAN	31 Desember 2025 Audited	31 Desember 2024	NAIK (TURUN)%
Pendapatan Pelepasan Aset	9.300.000	58.009.496	(83,97)
Pendapatan hasil lelang speedboat Kakap SDKP Padang	9.300.000		
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan (425121)		18.580.146	
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122)		39.429.350	
Beban Pelepasan Aset	(217.005.800)	(388.314.335)	(44,12)
Habis pakai Suku Cadang HMC 05	(47.561.250)		
Habis pakai Suku Cadang AE KP. Hiu 12	(82.589.550)		
Habis pakai Sucad mein engine KP. HMC 05	(66.370.000)		
Habis Pakai Sucad ME dan AE KP. Hiu 12	(20.485.000)		
Beban Kerugian Pelepasan Aset Peralatan, speedboat Bangunan Satwas SDKP Padang		(388.314.335)	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	304.281.800		
Pendapatan hasil rampasan KP Blessing GT.69	87.276.000		
Pembelian Suku Cadang Alat Angkutan Apung Bermotor	191.863.412		
Pembelian Suku Cadang Alat Besar Apung	19.647.888		
Pembelian Suku Cadang Lainnya	5.494.500		
Jumlah Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional	96.576.000	(330.304.839)	(129,24)

Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang **D.14 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang**
Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 *Audited* masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa **D.15 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa**
Saldo Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 *Audited* masing-masing defisit sebesar Rp32.879.601.004 dan defisit Rp31.576.402.231.

Surplus/Defisit LO **D.16 Surplus/Defisit Laporan Operasional**
Saldo Surplus/Defisit Laporan Operasional Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 *Audited* masing-masing defisit sebesar Rp32.879.601.004 dan defisit sebesar Rp31.576.402.231. Pos Surplus/Defisit Laporan Operasional merupakan penjumlahan dari Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional serta Pos Luar Biasa.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp25.969.887.937

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal untuk periode yang berakhir Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 *Audited* masing-masing sebesar *Rp25.969.887.937* dan *Rp24.065.064.343*.

Surplus Defisit

LO

Rp32.879.601.004

E.2 (Defisit) LO

Saldo Surplus/Defisit Laporan Operasional Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 *Audited* masing-masing defisit sebesar *Rp32.879.601.004* dan sebesar *Rp(31.576.402.23)*. Surplus defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi yang

Menambah/

Mengurangi

Ekuitas

Rp987.466.362

E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 *Audited* masing-masing sebesar defisit *Rp987.466.362* dan surplus *Rp1.344.502*. Koreksi yang menambah ekuitas sebesar *Rp987.466.362* koreksi nilai aset tetap non revaluasi sebesar *Rp(1.143.095.990)* dan koreksi atas reklasifikasi sebesar *Rp155.629.628*.

*Penyesuaian
Nilai Aset
Rp0*

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir. Nilai Penyesuaian Nilai Aset Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 *Audited* adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Atas
Reklasifikasi
Rp155.629.628*

E.3.2 Koreksi Reklasifikasi

Koreksi atas reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi atas reklasifikasi Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 *Audited* masing-masing sebesar Rp155.629.628 dan Rp0.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0.*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 *Audited* adalah Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp1.143.095.990*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 *Audited* masing-masing sebesar Rp(1.143.095.990) dan Rp1.331.252. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi tersebut adalah koreksi atas aset yang dihapuskan dan dilakukan reklasifikasi.

Koreksi Lain-Lain **E.3.6 Koreksi Lain-Lain**

Rp0

Koreksi Lain-Lain Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 *Audited* adalah sebesar **Rp0** dan **Rp13.250**. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lainnya adalah koreksi terhadap beban penyisihan piutang tak tertagih Tahun 2025.

Transaksi Antar **E.4 Transaksi Antar Entitas**

Entitas

Rp31.924.923.290

Nilai Transaksi Antar Entitas Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 dan Tahun 2024 *Audited* masing-masing sebesar **Rp31.924.923.290** dan **Rp33.479.881.323**. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas Tahun 2025 Audited yang berakhir 31 Desember 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(10.800.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	30.098.768.255
Transfer Masuk	1.841.728.035
Transfer Keluar	(4.773.000)
Pengesahan Hibah Langsung	-
Jumlah	31.924.923.290

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan

kas negara (BUN). Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 DDEL sebesar Rp10.800.000 berupa pendapatan yang telah dijelaskan di pos pendapatan pada LRA. Sedangkan DKEL sebesar Rp14.056.043.323 yang merupakan nilai realisasi netto belanja Tahun 2025 *Audited*.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer masuk dan transfer keluar Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 adalah Rp1.841.728.035 dan Rp4.773.000 yang merupakan nilai transfer masuk dan keluar BMN.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung Tahun 2025 *Audited* yang berakhir 31 Desember 2025 adalah Rp0.

Ekuitas Akhir

Rp24.027.743.861

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp24.027.743.861 dan Rp25.969.887.937.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Pengungkapan – Pengungkapan Lainnya.

1. Ketidaksesuaian Nilai Persediaan Barang Konsumsi.

Belanja persediaan barang konsumsi menurut LRA sebesar Rp53.536.600 namun menurut pencatatan dalam Daftar Rincian Persediaan barang Konsumsi senilai Rp53.771.600. Hal ini terjadi karena transaksi belanja barang persediaan senilai Rp235.000 yang telah dibatalkan melalui Void Bast yang diajukan melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Permohonan Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo Nomor B.140/PSDKPLan.1/KU.110/I/2026 KPPN tanggal 14 Januari 2026 masih tercatat dalam akun persediaan.

2. Rincian Pembelian Alat Kantor Lainnya pada Belanja Peralatan dan Mesin.

Pembelian barang berupa alat kantor sejumlah 15 (lima belas) unit dengan nilai sebesar Rp102.097.800 terdiri dari belanja Printer Epson L3210 sebanyak 6 (enam) unit dengan nilai sebesar Rp16.516.800 sesuai No BAST B.0627/PSDKPLan.1/PL.430/XII/2025, Scanner Epson D5410 sebanyak 5 (lima) unit dengan nilai sebesar Rp31.635.000 sesuai Nomor BAST B.0614/PSDKPLan.1/PL.430/XII/2025 tanggal 10 November 2025 (2 unit), BAST nomor B.0615/PSDKPLan.1/PL.430/XII/2025 tanggal 10 November 2025 (1 unit), BAST Nomor B.0624/PSDKPLan.1/PL.430/XII/2025 tanggal 14 November 2025 (1 unit), dan BAST Nomor B.0627/PSDKPLan.1/PL.430/XII/2025 tanggal 17 November 2025 (1 unit) dan Laptop HP VICTUS sebanyak 4 (empat) unit dengan nilai sebesar Rp53.964.000 sesuai No BAST

B.0689.1/PSDKPLan.1/PL.430/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025.

3. *Aset Lancar Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan (166112).*

Aset Lancar Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan ini berupa 1 (satu) unit speedboat NAPOLEON 08 perolehan tahun 2011 senilai Rp1.717.841.675 yang diserahterimakan dari Direktorat Pengendalian Operasi Armada dalam kondisi rusak berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor B.2903/DJPSDKP.1/PL.450/IX/2025 tanggal 04 September 2025. Aset ini telah tercatat dan terdaftar di pangkalan PSDKP Lampulo berdasarkan Berita Acara Inventarisasi Barang Milik Negara Nomor B.1880/PSDKPLan1/PL.710/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025.

4. *Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (491429).*

Pendapatan perolehan aset lainnya senilai Rp87.276.000 berupa 1 (satu) unit Kapal hasil sitaan (blessing) ukuran 69 GT berlokasi di PPS Kutaraja yang diserahterimakan oleh Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekjen KKP berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Nomor 689/SJ/PL.450/VII/2025 dan B.2287/DJPSDKP.1/PL.450/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025.

5. *Koreksi Pencatatan Aset Modul Tetap.*

Koreksi pencatatan aset modul tetap dilakukan karena terdapat kesalahan pencatatan kodefikasi barang dan nama barang sehingga perlu dilakukan koreksi untuk mengubah kode barang dan nama barang aset melalui transaksi Reklasifikasi keluar (penghapusan) dan Reklasifikasi masuk (perolehan) pada aplikasi SAKTI. Perubahan pencatatan kodefikasi (reklasifikasi aset) tersebut berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (NUP 2,5,3,1)

perolehan tahun 2015 dan 2009 dengan nilai masing-masing Rp272.090.000, Rp318.254.000, Rp268.791.000 dan Rp166.497.000 ke Rumah Negara Tipe B (NUP 2,5,3) perolehan tahun 2015 dan Rumah Negara Tipe C (NUP 1) perolehan tahun 2009 dengan total nilai Rp1.025.632.000.

6. *Revisi DIPA.*

Pangkalan PSDKP Lampulo telah melakukan 21 (dua puluh satu) kali revisi DIPA dan POK.

7. *Pencapaian Program Prioritas Nasional.*

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Pangkalan PSDKP Lampulo terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I dan V dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional yang pelaksanaannya diantaranya adalah sebagai berikut:

- A. *Prioritas Nasional I* - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Pelaksanaannya di antaranya melalui 5 program prioritas, yang tersebar di Pangkalan PSDKP Lampulo dengan pagu Rp19.336.159.000 dan realisasi sebesar Rp16.969.292.571 atau 87,76 persen dengan rincian sebagai berikut:

KODE	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN				KET
		ANGGARAN	REALISASI	%	Satuan	Target	Capaian	%	
2350.QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	17.470.003.000	15.103.561.058	86.45					
2350.QHD.001	Operasi Kapal Pengawas	17.172.532.000	14.809.308.058	86.24	Operasi	121	121	100.00	
2350.QHD.003	Operasi Speedboat Pengawas	297.471.000	294.253.000	98.92	Operasi	97	97	100.00	
2350.RCG	OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.419.948.000	1.419.584.152	99.97					
2350.RCG.001	Armada Pengawasan Yang Dirawat	1.419.948.000	1.419.584.152	99.97	Unit	6	6	100.00	
2352.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	446.208.000	446.147.361	99.99					
2352.QIC.001	Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya	123.955.000	123.904.000	99.96	Lembaga	25	25	100.00	
2352.QIC.002	Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak	322.253.000	322.243.361	100.00	Lembaga	68	68	100.00	
TOTAL		19.336.159.000	16.969.292.571	87.76					

- B. *Prioritas Nasional V* – Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 program prioritas, 1 kegiatan prioritas, yang terdapat di Pangkalan PSDKP Lampulo dengan pagu mencapai Rp1.550.000.000 namun anggaran kegiatan ini telah dihapus pada revisi DIPA ke-17 tanggal 19 November 2025 sehingga realisasi **Rp.0 pada Tahun 2025 Audited** yang berakhir 31 Desember 2025 sesuai tabel berikut:

KODE	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN			
		ANGGARAN	REALISASI	%	Satuan	Target	Capaian	%
2350.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman Kelautan dan Perikanan	1.550.000.000	-	-				
2350.RBQ.001	Prasarana Pengawasan SDKP Yang Dibangun	1.550.000.000	-	-	Unit	1	0	-
TOTAL		1.550.000.000	-	-				

8. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Fungsi/Program atau Kegiatan

Realisasi Anggaran Belanja menurut Akun/Program/Kegiatan Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2025 *Audited* sebagai berikut:

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
2350	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	18.055.548.000.	18.889.951.000.	16.523.145.210.	0.	16.523.145.210.	87.471	4.733.247.732.
	QHD Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam		17.470.003.000.	15.103.561.058.		15.103.561.058.	86.454	2.366.441.942.
	- Operasi Kapal Pengawas		17.172.532.000.	14.809.308.058.		14.809.308.058.	86.238	2.363.223.942.
	- Operasi Speedboat Pengawas		297.471.000.	294.253.000.		294.253.000.	98.918	3.218.000.
	RCG OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		1.419.948.000.	1.419.584.152.		1.419.584.152.	99.974	363.848.
	- Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas		1.419.948.000.	1.419.584.152.		1.419.584.152.	99.974	363.848.
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	256.615.000.	104.319.000.	104.211.872.	0.	104.211.872.	99.897	107.128.
	BCE Penanganan Perkara		104.319.000.	104.211.872.		104.211.872.	99.897	107.128.
	- Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif		32.389.000.	32.381.934.		32.381.934.	99.978	7.066.
	- Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana		71.930.000.	71.829.938.		71.829.938.	99.861	100.062.
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	1.634.537.000.	504.367.000.	503.417.922.	0.	503.417.922.	99.812	949.078.
	BHD Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam		58.159.000.	57.270.561.		57.270.561.	98.472	888.439.
	- Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan		20.505.000.	19.617.000.		19.617.000.	95.669	888.000.
	- Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan		37.654.000.	37.653.561.		37.653.561.	99.999	439.
	QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		446.208.000.	446.147.361.		446.147.361.	99.986	60.639.
	- Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya		123.955.000.	123.904.000.		123.904.000.	99.959	51.000.
	- Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya		322.253.000.	322.243.361.		322.243.361.	99.997	9.639.
2353	Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	300.000.000.	0.	0.	0.	0.	-	0.
	JUMLAH BELANJA PROGRAM HB	20.246.700.000.	19.498.637.000.	17.130.775.004.	0.	17.130.775.004.	87.86	4.734.303.938.
WA	Program Dukungan Manajemen							
2355	Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	14.762.922.000.	13.545.195.000.	12.968.061.082.	67.831.	12.967.993.251.	95.739	577.201.749.
	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal		12.918.379.000.	12.917.508.691.	67.831.	12.917.440.860.	99.993	938.140.
	- Layanan BMN		13.887.000.	13.886.083.		13.886.083.	99.993	917.
	- Layanan Umum		105.322.000.	105.317.847.		105.317.847.	99.996	4.153.
	- Layanan Data dan Informasi		10.725.000.	10.724.640.		10.724.640.	99.997	360.
	- Layanan Perkantoran		12.788.445.000.	12.787.580.121.	67.831.	12.787.512.290.	99.993	864.879.
	EBC Layanan Manajemen SDM Internal		15.536.000.	15.527.424.		15.527.424.	99.945	8.576.
	- Layanan Manajemen SDM		15.536.000.	15.527.424.		15.527.424.	99.945	8.576.
	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal		611.280.000.	35.024.967.		35.024.967.	5.73	576.255.033.
	- Layanan Manajemen Keuangan		17.250.000.	17.246.160.		17.246.160.	99.978	3.840.
	- Layanan Reformasi Kinerja		17.783.000.	17.778.807.		17.778.807.	99.976	4.193.
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	14.762.922.000.	13.545.195.000.	12.968.061.082.	67.831.	12.967.993.251.	95.74	577.201.749.
	JUMLAH BELANJA PROGRAM HB dan WA	35.009.622.000.	33.043.832.000.	30.098.836.086.	67.831.	30.098.768.255.	91.09	5.311.505.687.

Menurut Tabel Realisasi Anggaran Belanja diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Anggaran Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan (2350) setelah revisi sebesar Rp18.889.951.000, dengan realisasi belanja sebesar **Rp16.523.145.210** atau **87,47%** dan Sisa anggaran sebesar **Rp4.733.247.732**.

Realisasi kegiatan ini terdiri atas:

- ✓ Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam (QHD) dengan realisasi sebesar Rp15.103.561.058 meliputi *KRO Operasi kapal pengawas* sebesar Rp14.809.308.058 dan realisasi *KRO operasi speedboat pengawas* sebesar Rp294.253.000.
- ✓ OM Sarana Bidang Pertanian, kehutangan dan Perikanan (RCG) dengan realisasi sebesar Rp1.419.584.152 meliputi *KRO Pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas*.

- b. Anggaran Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan (2315) setelah revisi sebesar Rp104.319.000, dengan realisasi belanja sebesar **Rp104.211.872** atau **99,9%** dan Sisa anggaran sebesar **Rp107.128**.

Realisasi kegiatan ini terdiri atas *KRO Perkara Kelautan dan Perikanan* yang dikenakan Sanksi administratif dengan realisasi sebesar Rp32.381.934 dan *KRO Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana* sebesar Rp71.829.938.

- c. Anggaran Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (2352) setelah revisi sebesar Rp504.367.000, dengan realisasi belanja sebesar **Rp503.417.922** atau **99,81%** dan Sisa anggaran sebesar **Rp949.076**.

Realisasi kegiatan ini terdiri atas:

- ✓ Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam (BHD) dengan realisasi sebesar Rp57.270.561 meliputi *KRO Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan* sebesar

Rp19.617.000 dan *KRO Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan* sebesar Rp37.653.561.

- ✓ Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (QIC) dengan realisasi sebesar Rp446.147.361, meliputi realisasi *KRO Unit usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya* sebesar Rp123.904.000, dan realisasi *KRO Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya* sebesar Rp322.243.361.
- d. Anggaran Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan (2353) untuk kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat dengan Klasifikasi Rincian Output (*KRO*) *Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)* pada awalnya sebesar **Rp300.000.000**, namun setelah revisi ke-17 pada tanggal 19 November 2025 menjadi sebesar **Rp0**, karena kebijakan efisiensi anggaran.
- e. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (2350) setelah revisi sebesar Rp13.545.195.000, dengan realisasi belanja sebesar **Rp12.967.993.251** atau 95,74% dan Sisa anggaran sebesar **Rp577.201.749**.

Realisasi kegiatan ini terdiri atas:

- ✓ Layanan Dukungan Manajemen Internal (EBA) dengan realisasi sebesar Rp12.917.440.860 yang meliputi realisasi *KRO Layanan BMN* sebesar Rp13.886.083, *KRO Layanan Umum* sebesar Rp105.317.847, *KRO Data dan Informasi* sebesar Rp10.724.640, dan *KRO Perkantoran* sebesar Rp12.787.512.290.
- ✓ Layanan Manajemen SDM Internal (EBC) dengan realisasi sebesar Rp15.527.424, melalui realisasi *KRO Layanan Manajemen SDM*.

- ✓ Layanan Manajemen Kinerja Internal (EBD) dengan realisasi sebesar Rp35.024.967, yang meliputi realisasi *KRO Layanan Manajemen Keuangan* sebesar Rp17.246.160 dan realisasi *KRO Layanan Reformasi Kinerja* sebesar Rp17.778.807.

LAMPIRAN

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (065135) PANGKALAN PSDKP LAMPULO

Tgl Data : 04/05/26 7:38 PM

Tgl Cetak : 04/05/26 11:07 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	2,500,000	6,666,667	(4,166,667)	(62.50)
Persediaan	472,047,590	213,895,710	258,151,880	120.69
JUMLAH ASET LANCAR	474,547,590	220,562,377	253,985,213	115.15
ASET TETAP				
Tanah	6,263,317,551	6,263,317,551	0	0.00
Peralatan dan Mesin	78,122,917,521	46,350,966,244	31,771,951,277	68.55
Gedung dan Bangunan	15,310,155,758	15,243,825,758	66,330,000	0.44
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,323,630,762	2,100,578,762	223,052,000	10.62
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	10,000,000	(10,000,000)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(78,450,658,457)	(44,186,174,056)	(34,264,484,401)	77.55
JUMLAH ASET TETAP	23,569,363,135	25,782,514,259	(2,213,151,124)	(8.58)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	10,000,000	0	10,000,000	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	10,000,000	0	10,000,000	
JUMLAH ASET	24,053,910,725	26,003,076,636	(1,949,165,911)	(7.50)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	26,166,864	33,188,699	(7,021,835)	(21.16)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	26,166,864	33,188,699	(7,021,835)	(21.16)
JUMLAH KEWAJIBAN	26,166,864	33,188,699	(7,021,835)	(21.16)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	24,027,743,861	25,969,887,937	(1,942,144,076)	(7.48)
JUMLAH EKUITAS	24,027,743,861	25,969,887,937	(1,942,144,076)	(7.48)
JUMLAH EKUITAS	24,027,743,861	25,969,887,937	(1,942,144,076)	(7.48)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	24,053,910,725	26,003,076,636	(1,949,165,911)	(7.50)

Keterangan :

FINAL

BANDA ACEH, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Ditandatangani
Secara Elektronik

ABDUL QUDDUS

NIP 198301312006041002

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SATUAN KERJA : (065135) PANGKALAN PSDKP LAMPULO

Tgl Data : 04/05/26 7:38 PM
Tgl Cetak : 04/05/26 11:05 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	4,163,750	(4,163,750)	(100)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	4,163,750	(4,163,750)	(100)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	4,163,750	(4,163,750)	(100)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	9,963,618,662	9,008,334,550	955,284,112	10.604
Beban Persediaan	97,348,527	377,227,567	(279,879,040)	(74.194)
Beban Barang dan Jasa	14,455,009,654	9,356,113,160	5,098,896,494	54.498
Beban Pemeliharaan	2,437,268,426	2,875,079,568	(437,811,142)	(15.228)
Beban Perjalanan Dinas	997,088,120	4,318,865,706	(3,321,777,586)	(76.913)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SATUAN KERJA : (065135) PANGKALAN PSDKP LAMPULO

Tgl Data : 04/05/26 7:38 PM
Tgl Cetak : 04/05/26 11:05 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5,025,843,615	5,314,640,591	(288,796,976)	(5.434)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	32,976,177,004	31,250,261,142	1,725,915,862	5.523
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(32,976,177,004)	(31,246,097,392)	(1,730,079,612)	5.537
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(207,705,800)	(330,304,839)	122,599,039	(37.117)
Pendapatan Pelepasan Aset	9,300,000	58,009,496	(48,709,496)	(83.968)
Beban Pelepasan Aset	217,005,800	388,314,335	(171,308,535)	(44.116)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	304,281,800	0	304,281,800	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	304,281,800	0	304,281,800	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	96,576,000	(330,304,839)	426,880,839	(129.238)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(32,879,601,004)	(31,576,402,231)	(1,303,198,773)	4.127
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(32,879,601,004)	(31,576,402,231)	(1,303,198,773)	4.127

Keterangan :

FINAL

BANDA ACEH, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

ABDUL QUDDUS

NIP 198301312006041002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (065135) PANGKALAN PSDKP LAMPULO

Tgl Data : 04/05/26 6:37 PM

Tgl Cetak : 04/05/26 11:07 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	25,969,887,937	24,065,064,343	1,904,823,594	7.92
SURPLUS/DEFISIT-LO	(32,879,601,004)	(31,576,402,231)	(1,303,198,773)	4.13
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(987,466,362)	1,344,502	(988,810,864)	(73,544.77)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	155,629,628	0	155,629,628	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(1,143,095,990)	1,331,252	(1,144,427,242)	(85,966.24)
LAIN-LAIN	0	13,250	(13,250)	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	31,924,923,290	33,479,881,323	(1,554,958,033)	(4.64)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,942,144,076)	1,904,823,594	(3,846,967,670)	(201.96)
EKUITAS AKHIR	24,027,743,861	25,969,887,937	(1,942,144,076)	(7.48)

Keterangan :

FINAL

BANDA ACEH, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

ABDUL QUDDUS

NIP 198301312006041002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 05
SATUAN KERJA : PANGKALAN PSDKP LAMPULO 065135

Tgl Data : 04/05/26 7:38 PM
Tgl Cetak : 04/05/26 11:08 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	10,800,000	10,800,000	0	0	64,823,246	(64,823,246)	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	10,800,000	10,800,000	0	0	64,823,246	(64,823,246)	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	10,800,000	10,800,000	0	0	64,823,246	(64,823,246)	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	33,043,832,000	30,098,768,255	(2,945,063,745)	91	31,819,199,000	31,021,286,118	797,912,882	97
1. Belanja Pegawai	9,964,379,000	9,963,618,662	(760,338)	100	9,009,863,000	9,008,334,550	1,528,450	100
2. Belanja Barang	20,641,986,000	17,697,694,111	(2,944,291,889)	86	17,811,372,000	17,015,252,166	796,119,834	96
3. Belanja Modal	2,437,467,000	2,437,455,482	(11,518)	100	4,997,964,000	4,997,699,402	264,598	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 05
SATUAN KERJA : PANGKALAN PSDKP LAMPULO 065135

Tgl Data : 04/05/26 7:38 PM
Tgl Cetak : 04/05/26 11:08 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	33,043,832,000	30,098,768,255	(2,945,063,745)	91	31,819,199,000	31,021,286,118	797,912,882	97
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

BANDA ACEH, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

ABDUL QUDDUS
NIP 198301312006041002

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (065135) PANGKALAN PSDKP LAMPULO

Tgl Data : 04/05/26 6:37 PM

Tgl Cetak : 04/05/26 11:08 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	30,098,768,255
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	10,800,000	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	9,300,000
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,500,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,607,964,900	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	35,403	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	198,374,600	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	71,638,652	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	26,280,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	70,610,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	13,264,013	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	163,886,460	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	306,328,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	86,030,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	974,572,800	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	17,667	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	73,903,880	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	23,976,662	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	70,320,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	71,695,800	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	102,919,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	11,400,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	121,912,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	54,682,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	3,629,613,476	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,284,261,180	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,246,175,820	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	185,615,830	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,412,100	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	109,710,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	432,933,600	0
3.0	521211	Belanja Bahan	10,445,768,700	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	27,100,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	812,894,367	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	53,536,600	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	285,536,109	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	152,767,826	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	11,204,808	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (065135) PANGKALAN PSDKP LAMPULO

Tgl Data : 04/05/26 6:37 PM

Tgl Cetak : 04/05/26 11:08 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522141	Belanja Sewa	43,435,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	699,310,662	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	251,696,600	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,253,983,382	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	646,036,087	0
3.0	523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	8,000,000	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	29,488,500	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	952,355,237	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,389,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	31,343,883	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	443,066,482	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	1,703,507,000	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30,830,000	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	37,000,000	0
3.0	534121	Belanja Modal Irigasi	30,000,000	0
3.0	534131	Belanja Modal Jaringan	193,052,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	119
3.1	511125	Pengembalian Belanja Tunj. PPh PNS	0	67,712
JUMLAH			30,109,636,086	30,109,636,086

Keterangan :

FINAL

BANDA ACEH, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Ditandatangani
Secara Elektronik

ABDUL QUDDUS

198301312006041002

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (065135) PANGKALAN PSDKP LAMPULO

Tgl Data : 04/05/26 7:38 PM

Tgl Cetak : 04/05/26 11:08 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	2,500,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	18,333,610	0
0.0	117114	Suku Cadang	453,713,980	0
0.0	131111	Tanah	6,263,317,551	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	78,122,917,521	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	15,310,155,758	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	640,828,171	0
0.0	134112	Irigasi	1,145,452,260	0
0.0	134113	Jaringan	537,350,331	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	75,619,519,095
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,132,937,830
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	444,503,596
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	200,604,784
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	53,093,152
0.0	166115	Konstruksi Dalam Pengerjaan yang Dihentikan dari Operasi	10,000,000	0
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	26,166,864
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	30,098,768,255
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	10,800,000	0
0.0	313211	Transfer Keluar	4,773,000	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	1,841,728,035
0.0	391111	Ekuitas	0	25,969,887,937
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1,143,095,990	0
0.0	391151	Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0	155,629,628
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	9,300,000
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	304,281,800
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,607,964,900	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	35,284	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	198,374,600	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	71,638,652	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	26,280,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	70,610,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	13,196,301	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	163,886,460	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	306,328,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	86,030,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	974,572,800	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	17,667	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	73,903,880	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (065135) PANGKALAN PSDKP LAMPULO

Tgl Data : 04/05/26 7:38 PM

Tgl Cetak : 04/05/26 11:08 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	23,976,662	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	70,320,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	71,695,800	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	102,919,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	11,400,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	121,912,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	54,682,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	3,629,613,476	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,284,261,180	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,246,175,820	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	185,615,830	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,412,100	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	109,710,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	432,933,600	0
3.0	521211	Beban Bahan	10,445,768,700	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	27,100,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	812,894,367	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	281,580,090	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	149,761,693	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	11,145,125	0
3.0	522141	Beban Sewa	47,601,667	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	699,310,662	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	251,696,600	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,253,983,382	0
3.0	523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	8,000,000	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	29,488,500	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	952,355,237	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,389,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	31,343,883	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4,617,568,948	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	314,943,402	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	54,794,450	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	26,637,602	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	11,899,213	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	97,348,527	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	8,991,000	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	885,108,944	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	217,005,800	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (065135) PANGKALAN PSDKP LAMPULO

Tgl Data : 04/05/26 7:38 PM

Tgl Cetak : 04/05/26 11:08 PM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
JUMLAH			136,856,420,976	136,856,420,976

Keterangan :

FINAL

BANDA ACEH, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Ditandatangani
Secara Elektronik

ABDUL QUDDUS

NIP 198301312006041002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 0600
SATUAN KERJA : 065135
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
PANGKALAN PSDKP LAMPULO

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/26 11:16 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 4/5/26 8:12 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,501,842,000	2,607,966,000	2,607,964,900	0	2,607,964,900	100	1,100
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	42,000	36,000	35,403	119	35,284	98.01	716
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	187,992,000	198,376,000	198,374,600	0	198,374,600	100	1,400
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	66,276,000	71,640,000	71,638,652	0	71,638,652	100	1,348
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	32,760,000	26,280,000	26,280,000	0	26,280,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	70,490,000	70,610,000	70,610,000	0	70,610,000	100	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	952,000	13,265,000	13,264,013	67,712	13,196,301	99.48	68,699
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	133,836,000	163,887,000	163,886,460	0	163,886,460	100	540
511129	Belanja Uang Makan PNS	216,000,000	306,561,000	306,328,000	0	306,328,000	99.92	233,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	74,760,000	86,030,000	86,030,000	0	86,030,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	3,284,950,000	3,544,651,000	3,544,412,028	67,831	3,544,344,197	99.99	306,803
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	808,416,000	974,574,000	974,572,800	0	974,572,800	100	1,200
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	28,000	20,000	17,667	0	17,667	88.33	2,333
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	57,638,000	73,904,000	73,903,880	0	73,903,880	100	120
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	20,650,000	23,978,000	23,976,662	0	23,976,662	99.99	1,338
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	70,140,000	70,320,000	70,320,000	0	70,320,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	51,276,000	71,696,000	71,695,800	0	71,695,800	100	200
511628	Belanja Uang Makan PPPK	48,000,000	103,272,000	102,919,000	0	102,919,000	99.66	353,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	11,400,000	11,400,000	0	11,400,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	1,056,148,000	1,329,164,000	1,328,805,809	0	1,328,805,809	99.97	358,191
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	71,544,000	121,965,000	121,912,000	0	121,912,000	99.96	53,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	14,592,000	54,720,000	54,682,000	0	54,682,000	99.93	38,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	86,136,000	176,685,000	176,594,000	0	176,594,000	99.95	91,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	3,014,276,000	3,629,616,000	3,629,613,476	0	3,629,613,476	100	2,524
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,057,602,000	1,284,263,000	1,284,261,180	0	1,284,261,180	100	1,820
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	4,071,878,000	4,913,879,000	4,913,874,656	0	4,913,874,656	100	4,344
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	8,499,112,000	9,964,379,000	9,963,686,493	67,831	9,963,618,662	99.99	760,338
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 0600
SATUAN KERJA : 065135
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
PANGKALAN PSDKP LAMPULO

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/26 11:16 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 4/5/26 8:12 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,671,542,000	1,246,353,000	1,246,175,820	0	1,246,175,820	99.99	177,180
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	266,902,000	185,627,000	185,615,830	0	185,615,830	99.99	11,170
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,000,000	5,414,000	5,412,100	0	5,412,100	99.96	1,900
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	138,560,000	109,710,000	109,710,000	0	109,710,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	232,800,000	432,935,000	432,933,600	0	432,933,600	100	1,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,327,804,000	1,980,039,000	1,979,847,350	0	1,979,847,350	99.99	191,650
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	13,386,095,000	12,856,658,000	10,445,768,700	0	10,445,768,700	81.25	2,410,889,300
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	13,730,000	28,550,000	27,100,000	0	27,100,000	94.92	1,450,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	898,228,000	883,966,000	812,894,367	0	812,894,367	91.96	71,071,633
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	14,298,053,000	13,769,174,000	11,285,763,067	0	11,285,763,067	81.96	2,483,410,933
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	203,000,000	53,724,000	53,536,600	0	53,536,600	99.65	187,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	203,000,000	53,724,000	53,536,600	0	53,536,600	99.65	187,400
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	387,600,000	285,538,000	285,536,109	0	285,536,109	100	1,891
522112	Belanja Langganan Telepon	164,400,000	152,845,000	152,767,826	0	152,767,826	99.95	77,174
522113	Belanja Langganan Air	18,000,000	11,206,000	11,204,808	0	11,204,808	99.99	1,192
522141	Belanja Sewa	245,440,000	43,440,000	43,435,000	0	43,435,000	99.99	5,000
522151	Belanja Jasa Profesi	61,700,000	7,200,000	0	0	0	0	7,200,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	686,943,000	702,646,000	699,310,662	0	699,310,662	99.53	3,335,338
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,564,083,000	1,202,875,000	1,192,254,405	0	1,192,254,405	99.12	10,620,595
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	507,835,000	251,697,000	251,696,600	0	251,696,600	100	400
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,477,876,000	1,254,324,000	1,253,983,382	0	1,253,983,382	99.97	340,618
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	828,500,000	646,090,000	646,036,087	0	646,036,087	99.99	53,913
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	100	0
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	0	29,489,000	29,488,500	0	29,488,500	100	500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	2,814,211,000	2,189,600,000	2,189,204,569	0	2,189,204,569	99.98	395,431
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,669,359,000	1,240,764,000	952,355,237	0	952,355,237	76.76	288,408,763
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	186,630,000	24,197,000	13,389,000	0	13,389,000	55.33	10,808,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	35,300,000	19,500,000	0	0	0	0	19,500,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	513,077,000	162,113,000	31,343,883	0	31,343,883	19.33	130,769,117

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 0600
SATUAN KERJA : 065135
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
PANGKALAN PSDKP LAMPULO

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/26 11:16 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 4/5/26 8:12 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	3,404,366,000	1,446,574,000	997,088,120	0	997,088,120	68.93	449,485,880
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	24,611,517,000	20,641,986,000	17,697,694,111	0	17,697,694,111	85.74	2,944,291,889
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	420,268,000	443,078,000	443,066,482	0	443,066,482	100	11,518
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	1,703,507,000	1,703,507,000	0	1,703,507,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	420,268,000	2,146,585,000	2,146,573,482	0	2,146,573,482	100	11,518
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	30,830,000	30,830,000	0	30,830,000	100	0
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan	100,000,000	0	0	0	0		0
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1,378,725,000	37,000,000	37,000,000	0	37,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	1,478,725,000	67,830,000	67,830,000	0	67,830,000	100	0
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan							
534121	Belanja Modal Irigasi	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	100	0
534131	Belanja Modal Jaringan	0	193,052,000	193,052,000	0	193,052,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341	0	223,052,000	223,052,000	0	223,052,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	1,898,993,000	2,437,467,000	2,437,455,482	0	2,437,455,482	100	11,518
	JUMLAH BELANJA	35,009,622,000	33,043,832,000	30,098,836,086	67,831	30,098,768,255	91.09	2,945,063,745

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
SATUAN KERJA : 065135

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PSDKP LAMPULO

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 04/05/26 11:17 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
2350	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	11,652,730,000	12,487,133,000	12,482,660,528	0	12,482,660,528	99.96	4,472,472
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	256,615,000	104,319,000	104,211,872	0	104,211,872	99.9	107,128
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	1,634,537,000	504,367,000	503,417,922	0	503,417,922	99.81	949,078
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	300,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH BELANJA PROGRAM HB	13,843,882,000	13,095,819,000	13,090,290,322	0	13,090,290,322	99.96	5,528,678
WA	Program Dukungan Manajemen							
2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	14,762,922,000	13,545,195,000	12,968,061,082	67,831	12,967,993,251	95.74	577,201,749
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	14,762,922,000	13,545,195,000	12,968,061,082	67,831	12,967,993,251	95.74	577,201,749
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	28,606,804,000	26,641,014,000	26,058,351,404	67,831	26,058,283,573	97.81	582,730,427
04	PNBP							
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
2350	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	6,402,818,000	6,402,818,000	4,040,484,682	0	4,040,484,682	63.1	2,362,333,318
	JUMLAH BELANJA PROGRAM HB	6,402,818,000	6,402,818,000	4,040,484,682	0	4,040,484,682	63.1	2,362,333,318
	JUMLAH BELANJA PNBP	6,402,818,000	6,402,818,000	4,040,484,682	0	4,040,484,682	63.1	2,362,333,318
	JUMLAH	35,009,622,000	33,043,832,000	30,098,836,086	67,831	30,098,768,255	91.09	2,945,063,745

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
ESELON I : 05 **DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**
WILAYAH/PROVINSI : 0600 **NANGGROE ACEH DARUSSALAM**
SATUAN KERJA : 065135 **PANGKALAN PSDKP LAMPULO**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 04/05/26 11:18 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	9,300,000	0	9,300,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	9,300,000	0	9,300,000	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,500,000	0	1,500,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	1,500,000	0	1,500,000	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	10,800,000	0	10,800,000	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	10,800,000	0	10,800,000	

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TAHUN 2025 (AUDITED)

Kode dan Nama UAKPA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kode dan Nama UAPPAW : PROVINSI ACEH
Kode dan Nama Eselon 1 : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kode dan Nama K/L : (065135) PANGKALAN PSDKP LAMPULO

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan AkruaI Saldo Awal	✓		Ada
2	Neraca Percobaan AkruaI	✓		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		✓	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	✓		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		✓	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		✓	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		✓	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		✓	Tidak

Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNB		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		√	Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak

11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)	N/A	N/A	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)	N/A	N/A	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.	N/A	N/A	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)	N/A	N/A	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	N/A	N/A	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	N/A	N/A	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	N/A	N/A	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	N/A	N/A	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	N/A	N/A	Ya
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	N/A	N/A	Ya
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?	√		Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?	√		Ya
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?	√		Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?		√	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			

	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?		√	Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		√	Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	√		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Tidak

7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	N/A	N/A	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		√	Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		√	Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		√	Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ya
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?	√		Ya
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	√		Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas	N/A	N/A	Tidak
2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas	N/A	N/A	Tidak
	Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		√	Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual	N/A	N/A	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	√		Ya
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	N/A	N/A	Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?	N/A	N/A	Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?	N/A	N/A	Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?	N/A	N/A	Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	N/A	N/A	Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?	N/A	N/A	Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?	N/A	N/A	Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	N/A	N/A	Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	N/A	N/A	Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU	N/A	N/A	Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	N/A	N/A	Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	N/A	N/A	Ya

7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU	N/A	N/A	Ya
---	--	-----	-----	----

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang **TIDAK SEHARUSNYA**, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MONSAKTI"

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,



(Thomas Romano Putra, S.Pi., M.Pi.)
NIP. 198605012009121003

Banda Aceh, 4 Mei 2026
Penelaah,



(Venol Ferdiansyah, S.Pi.)
NIP. 198201162009041006